



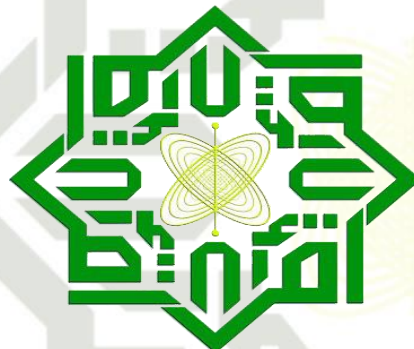
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASAL 29 UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asy-Syaksiyah*)

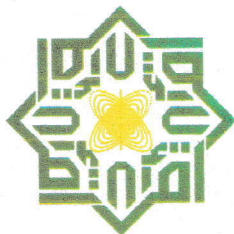


UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**REKA DESRINA WATI
NIM. 21990225664**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 M / 1442 H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Reka Desrina Wati
Nomor Induk Mahasiswa : 21990225664
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut
Hukum Islam

Tim Penguji:

Dr. Rusdi, MA
Penguji I/Ketua

Dr. Akmal Munir, Lc., M.A.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Sofia Hardani, M.Ag
Penguji III

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

05/04/2021

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis dengan ini *mengesahkan* dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Reka Desrina Wati
NIM : 21990225664
Program Studi : Magister
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 05 April 2021

Penguji I,


Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP.196305301993032001



.....
Tgl: 05 April 2021


Penguji II,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP.196708221998031001



.....
Tgl: 05 April 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP.196708221998031001

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Reka Desrina Wati
NIM : 21990225664
Program Studi : Magister
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 05 April 2021


Pembimbing I,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP.196708221998031001


.....
Tgl: 06 April 2021

Pembimbing II,

Dr. Azni, M.Ag
NIP.197010102007011051


.....
Tgl: 06 April 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP.196708221998031001

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis saudari
Reka Desrina Wati

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudari:

Nama	: Reka Desrina Wati
NIM	: 21990225664
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau Menurut Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 09 Maret 2021
Pembimbing I



Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP.196708221998031001

Dr. Azni, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis saudara
Reka Desrina Wati

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

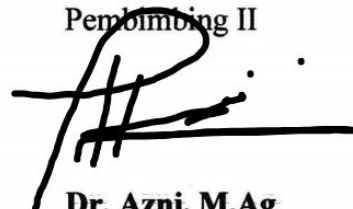
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Reka Desrina Wati
NIM	: 21990225664
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau Menurut Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 08 Maret 2021
Pembimbing II



Dr. Azni, M.Ag
NIP. 197010102007011051

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Reka Desrina Wati**
Nim : 21990225664
Tempat/Tanggal Lahir : Arga Makmur, 26 Desember 1995
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal asy-Syakhsiyah*)
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **“Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan karya saya sendiri atau adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Maret 2021



Reka Desrina Wati
NIM: 21990225664



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan cinta dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **“Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah Swt. semoga disampaikan kepada *Habibullah* Rasulullah Muhammad Saw. sebagai teladan dan pimpinan manusia yang bermoral dan berakhlak mulia, sosok yang bijaksana yang menjadi panutan bagi seluruh umatnya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya istimewa kepada Ayahanda tercinta Drs. Salmi dan Ibunda tersayang Sunarti, yang telah memberikan dukungan materi, motivasi dan dorongan untuk tetap bertahan dan semangat dalam menuntut ilmu, serta selalu berdo’a demi kesuksesan penulis dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan suka dan duka. Selanjutnya kepada saudara kandung penulis Ehamidah Islamy, Fajrinnida Desfitri, Muhammad Rizky Deskhairi dan Mufti Vito Syarfi yang juga selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, terimakasih atas segala cinta kalian, hanya Allah Swt yang dapat memberikan balasan terbaik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Tesis ini tidak lepas dari perhatian, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti dan berharga bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Prof. Dr. Afrizal M, M.A selaku Direktur dan Bapak H. Iskandar Arnel, MA, Ph.D selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang selalu melayani dan mengayomi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga dengan sepenuh hati. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau.

Bapak Dr. H. Erman., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA), semoga Allah membalas kebaikan hati beliau dengan pahala yang berlipat ganda.

Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Azni, M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis dengan kesabaran dan keikhlasan sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, serta segenap Civitas Akademika yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membekali penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Bapak/Ibu Pegawai Pustaka Pascasarjana, yang telah menyediakan fasilitas kepastakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan Tesis ini.

Sahabat penulis Iis Aisyah, M.Pd dan Nurhasanah S.pd, M.Ag yang telah membantu dan mengisi hari-hari penulis selama menjalani Studi di Kota Pekanbaru ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin hingga bersua di Jannah-Nya, aamiin.

9. Teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah berbagi suka-duka dan sama-sama berjuang dengan penulis dalam menuntut ilmu di kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, tetap semangat dengan perjuangan ini. Ingat, apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai.

Teman-teman dan Miss-miss guru di Alumna Islamic School Sukajadi yang telah berbagi pengalaman akan pentingnya peran seorang pendidik.

Terakhir, kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan dan dorongan dalam penyelesaian Tesis ini, khususnya yang menyelipkan do'a demi kesuksesan penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu, semoga Allah Swt membalasi semuanya.

Penulis tidak dapat memberikan apa-apa kepada mereka semua selain ucapan terima kasih yang tulus serta iringan do'a, semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan Rahmat, Taufiq, dan Inayah-Nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Tesis ini, bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk hasil terbaik, namun disadari masih banyak ditemukan kekurangan dan kejanggalan. Untuk itu apapun kekurangan yang terdapat dalam Tesis ini, mudah-mudahan dapat diberi kritik dan saran yang membangun oleh pembaca untuk kebaikan tulisan ini di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 10 Maret 2021

Penulis

Reka Desrina Wati
NIM: 21990225664

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	i
Pengesahan Penguji	ii
Pengesahan Pembimbing.....	iii
Halaman Nota Dinas	iv
Surat Pernyataan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Pedoman Transliterasi	xiii
Abstrak	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	17
1. Identifikasi Masalah	17
2. Batasan Masalah.....	17
3. Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Sistematika/Teknik Penulisan	20

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	22
B. Landasan Teori	27
1. Perkawinan Dalam Hukum Islam	27
2. Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan	46
3. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam	50
4. Perjanjian Perkawinan Menurut Perundang-Undangan	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Definisi Operasional Penelitian	64
--	----

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	67
B. Sumber Data	74
C. Teknik Pengumpulan Data	76
D. Teknik Analisis Data	79

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Aturan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	81
B. Ketentuan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam	98
1. Waktu Membuat Perjanjian Perkawinan	98
2. Batasan Membuat Perjanjian Perkawinan.....	102
3. Isi Perjanjian Perkawinan	116
4. Mengubah dan Mencabut Perjanjian Perkawinan	133
5. Akibat Hukum Dari Perjanjian Perkawinan	135

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	142
B. Saran dan Rekomendasi	143

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987** pada tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	’
ش	Sh	ي	Y
ط	Dl		

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (difting).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Vokal Tunggal/Monoftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut;

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ	Fathah	A	A
2.	-----◌ِ	Kasrah	I	I
3.	-----◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut;

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِيْ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	اُوْ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut;

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	◌َ ا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	◌َ اَ اَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh: مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul athfal* atau *raudah al-athfal*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: وَرْدَةُ الْجَنَّةِ : *wardatul jannah*

3. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-haqqu*

عُدُّوْا : *'aduwwa*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh: عَرَبِيٌّ : 'arabiyy atau araby

Kata Sandang “ال”

Kata sandang ditransliterasi dengan membedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan huruf *syamsiyyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

1. Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: الْقَمَرِيَّة : al-qamariyyah

2. Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya.

Contoh: الشَّمْسِيَّة : asy-syamsiyah

Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau *apostrof* jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ : syai'un



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri (orang, tempat, bulan), setelah kata sandang “al” dan sebagainya. Judul referensi yang didahului dengan kata sandang “al” maka ketentuan seperti ini berlaku juga baik itu ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh: *Al-Ghazālī*

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.

Contoh: Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

I. Lafz *al-jalalah* (الله)

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital itu tidak digunakan. Adapun jika kata “Allah” didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍā ilaih* (frasa nominal) maka ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دين الله : *dīnullāh*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Kalimat yang sudah lazim atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan cara dipisah per-kata dan dirangkaikan.

Contoh : *F̣īzilāl al-Qur'ān*

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

ABSTRAK

Reka Desrina Wati : Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, untuk mengatur akibat dari perkawinan seperti harta kekayaan, hubungan suami dan isteri serta hubungan anak dan orang tua. Praktik perjanjian perkawinan telah dikenal dalam Islam dengan istilah persyaratan dalam pernikahan, yaitu syarat-syarat yang diajukan untuk keberlangsungan akad dan memiliki manfaat. Karena itu perlu dikaji lebih lanjut bagaimana ketentuan pada pasal 29 bila dipandang menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat *yuridis normative* karena mengkaji sumber data hukum tertulis dan bahan pustaka dengan mengacu pada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan *syar'i* yang berhubungan dengan hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dan dianalisis dengan menjelaskan perjanjian perkawinan menggunakan metode induktif, kemudian setiap ayat dalam pasal 29 dipandang dengan kacamata hukum Islam. Adapun hasil penelitian ialah; Pada pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis sebelum, ketika akad dan setelah akad, harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawinan dan kapanpun dibutuhkan, dapat dibuat mengenai harta perkawinan dan perjanjian lain berdasarkan kesepakatan bersama perjanjian dapat dirubah bahkan dicabut. Dalam hukum Islam, persyaratan perkawinan hanya bisa dibuat sebelum dan pada waktu akad, yang mana isinya tidak boleh bertentangan dengan syari'at dan tujuan pernikahan. Menurut *Fuqaha'* perjanjian perkawinan itu ada yang *shahih* yaitu memiliki manfaat dan sesuai dengan tujuan pernikahan maka ini harus dipenuhi, syarat yang *fasid* tidak harus dipenuhi karena ada pihak yang tersakiti dan bertentangan dengan syari'at. Isi perjanjian perkawinan dapat berupa percampuran harta, pemisahan harta, larangan KDRT, larangan poligami dan sebagainya. Perjanjian yang telah dibuat tidak boleh dicabut lagi, karena hal ini lumpamakan seperti orang yang menarik kembali hibah yang telah dia beri dan Rasulullah Saw sangat mencela perbuatan tersebut. Namun hal ini diperbolehkan jika telah ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: perjanjian perkawinan, perundang-undangan, hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Reka Desrina Wati : Marriage Agreement In the Article 29 Laws number 1 of 1974 Reviewed According to Islamic Law

This research is motivated by the provisions of the marriage agreement in Article number 29 of Laws Number 1 of 1974, to regulate the consequences of marriage, examples of assets, husband and wife relationships, as well as the relationship between children and parents. Known in Islam by the terms of the requirements of marriage. The terms proposed for the continuation of the contract and have benefit. Because it needs to be reviewed how the provisions in article 29 when viewed according to Islamic law. This research is juridical normative because it examines the source of the data, written law, and library materials by refers to the statute approach, and approaches related to Islamic law. Data is collected through review of books by method library research, and analyzed with explain the marriage agreements using inductive methods, and then Each verse in article number 29 is examined with Islamic law. The results of the research are to achieve benefits in marriage included in article number 29 of laws number 1 of 1974, the agreement can be made in written form, before, during or after the contract, must be certified by the employee marriage registrar, the contents of the agreement must not violate legal, religious and moral boundaries, comes into force since the marriage and whenever it is needed. It is permissible for marriage assets and other agreements based on mutual agreement, that the agreement can be changed or even revoked. In Islamic law marriage agreements can only be made, before and during the contract, the contents must not conflict with the shari'ah and the purpose of marriage. According to the jurisprudence expert, there is a valid marriage agreement that has benefits and is in accordance with the purpose of the marriage, then this must be fulfilled, the usual conditions do not have to be fulfilled because there are parties who are hurt and conflicted. The contents of a marriage agreement can be in the form of a mixture of assets, separation of assets, prohibition of domestic violence, prohibition of polygamy and so on. The agreement that has been made may not be revoked again, it is the same as taking a prize back, the prophet strongly denounced this act, this is allowed if there is an agreement between the two parties, and no party will be harmed.

Keyword : *Marriage Agreement, Statute, Islamic law*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

تتم مراجعة اتفاقية الزواج الواردة في المادة ٢٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ وفقاً للشريعة الإسلامية:

خلفية هذا البحث بسبب عقد الزواج والغرض في المادة ٢٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ منه هو تنظيم عواقب الزواج مثل الثروة، العلاقة بين الزوج والزوجة وكذلك العلاقة بين الأبناء والآباء. تُعرف ممارسة عقود الزواج في الإسلام بشروط الزواج، وهي الشروط المقترحة لاستمرار العقد ولها فوائد، لذلك، من الضروري إجراء مزيد من الدراسة حول كيفية النظر إلى أحكام المادة ٢٩ وفقاً للشريعة الإسلامية. يعتبر هذا البحث معيارياً قانونياً لأنه يفحص مصادر البيانات القانونية المكتوبة والأدبيات مع الإشارة إلى المنهج القانوني، ونهج الشريعة المتعلقة بالشريعة الإسلامية. يتم جمع البيانات عن طريق البحث في المكتبة وتحليلها بشرح عقد الزواج بالطريقة الاستقرائية، ثم يتم النظر إلى كل آية في الفصل ٩ في ضوء الشريعة الإسلامية. نتائج البحث: في المادة ٢٩ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤، يمكن إبرام الاتفاقية كتابة قبل العقد وأثناءه وبعده. يجب أن يتم التصديق على الاتفاقية من قبل مسجل الزواج، ويجب ألا تنتهك محتوياتها حدود القانون والدين والأخلاق. تدخل حيز التنفيذ منذ الزواج وكلما دعت الحاجة، فيما يتعلق بأصول الزواج والاتفاقيات الأخرى القائمة على الاتفاق المتبادل، يمكن تغيير الاتفاقية أو حتى إلغائها في الشريعة الإسلامية، لا يمكن تحديد شروط الزواج إلا قبل ووقت العقد. التي يجب ألا تتعارض محتوياتها مع الشريعة والغرض من الزواج. عند الفقهاء عقد النكاح صحيح، وهو نافع، ويتفق مع الغرض من النكاح، ولا بد من استيفاء ذلك، ولا يشترط توافر الشروط الفاسدة؛ لوجود أطراف متضررة. إنها ضد القانون. يمكن أن تكون محتويات اتفاقية الزواج في شكل مزيج من الأصول، وفصل الأصول، وحظر العنف المنزلي، وحظر تعدد الزوجات وما إلى ذلك. لا يجوز إلغاء الاتفاقية التي تم إبرامها مرة أخرى، لأن هذا يشبه الشخص الذي يسحب المنفعة التي قدمها، وشجب رسول الله بشدة هذا العمل، ومع ذلك، هذا مسموح به إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين ولم يكن أي من الطرفين محروماً.

الكلمات الدلالية: اتفاقية الزواج، تشريع، قانون اسلامي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perjanjian perkawinan itu penting untuk melindungi akibat hukum dari perkawinan, yaitu hubungan antara suami dan isteri, harta benda kekayaan dan hubungan antara orangtua dan anak.¹ Maka dibuatlah pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum positif yang terdapat pada pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam Islam lebih dikenal dengan istilah syarat dalam pernikahan yang hakikatnya pun sama yaitu membuat kesepakatan antara calon suami dan isteri yang bermanfaat bagi keduanya.

Secara umum para pakar hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian perkawinan yaitu; menurut Komar Andasmita perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang diadakan oleh calon suami dan isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.² Selanjutnya menurut pendapat Prof. Ali Afandi, SH, perjanjian kawin adalah perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan dalam bidang harta kekayaan.³ Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safiudin juga menjelaskan bahwa perjanjian kawin ialah perjanjian yang

¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008) h. 41

² Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar, 1990) h. 5

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pt. Bina Aksara, 1986) h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴ Berdasarkan pendapat para pakar hukum, dapat disimpulkan secara umum bahwa perjanjian perkawinan mengatur tentang harta benda, baik itu mengenai pemisahan harta kekayaan ataupun mencegah timbulnya permasalahan terkait harta bersama jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian perkawinan juga merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang mana mereka berjanji untuk memenuhinya apabila mereka sudah menikah.

Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) karena dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, masing-masing pihak pun mesti berjanji untuk mentaati apa yang diperjanjikan.⁵ Namun seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut dilekatkan pada akta nikah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat nikah.

Semenjak perkawinan dilangsungkan dan perjanjian telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka semenjak itu pula perjanjian ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Jika perjanjian perkawinan tidak

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 1987) h. 57

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu bukanlah perjanjian perkawinan melainkan hanya perjanjian biasa yang berlaku secara umum.⁶ Perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya dan pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut. Jadi ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak wajib memenuhinya sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.⁷

Pada awalnya latar belakang dibuatnya perjanjian perkawinan ialah jika di antara suami isteri terdapat perbedaan status sosial atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, hal ini guna untuk melindungi harta masing-masing dengan membuat perjanjian perkawinan pemisah harta. Perjanjian perkawinan ini juga diperlukan bagi pelaku perkawinan campur untuk melindungi hak atas propertinya. Sebelumnya hukum perundang-undangan mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami isteri dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat, karena ini lah diadakannya perjanjian perkawinan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut.⁸

Masyarakat Indonesia mulanya masih beranggapan bahwa membuat perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan tindakan yang tidak mencerminkan budaya Timur. Perjanjian perkawinan yang bersifat *individualistik* sebagaimana pandangan hidup orang Barat menjadi suatu hal

⁶ H.A Damanhuri, *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) h. 11

⁷ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami dan Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Gender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004) h. 159

⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gras, 2001) h. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang asing dan kurang cocok untuk diberlakukan di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia yang mempunyai pandangan hidup paguyuban, belum sah dan terikat dalam akad sudah membuat perjanjian mengenai hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan. Hal ini seperti tidak adanya kepercayaan antara calon suami-isteri karena perkawinan yang di anggap sebagai sarana untuk menyatukan dua insan menjadi ternodai dengan adanya perjanjian-perjanjian.⁹ Dikarenakan juga pengaruh hukum adat di Indonesia yang masih mendarah daging dan bersifat tenggang rasa, seperti terlihat dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa warisan terutama yang merupakan milik bersama (harta gono-gini dan harta pencarian) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia.¹⁰ Demikianlah yang membuat belum dikenalnya perjanjian perkawinan pada calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga minimnya sosialisasi tentang perjanjian perkawinan terhadap calon pasangan suami isteri juga menjadi faktor penghambat dalam membuat perjanjian perkawinan.

Seiring perkembangan zaman masyarakat lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan, terlebih juga karena perkembangan emansipasi wanita yang mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan dan juga untuk melindungi hak sebagai isteri. Dalam mempertahankan hak dan menuntut adanya kewajiban sikap individualistik memiliki banyak keuntungan. Sebagai contohnya dalam kehidupan rumah tangga, bisa saja salah seorang

⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) h. 147

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami atau isteri memiliki hutang tanpa diketahui oleh pihak lain namun tidak dapat melunasinya dan perkaranya diselesaikan di Pengadilan hingga ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa aset harus dilelang guna melunasi hutang-hutang tersebut, maka yang harus dilelang hanyalah aset-aset milik dan atas nama yang berhutang saja. Dengan begitu pada akhirnya anak-anak dan keluarga masih dapat melanjutkan hidup dengan aset-aset yang ada dan dapat memulai kembali kehidupan tanpa adanya cekcok antara suami dan isteri yang bisa saja berujung pada perceraian.¹¹

Iniilah salah satu manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga, perjanjian tersebut memberikan batasan tegas mengenai hak kepemilikan suami atau isteri atas benda atau harta kekayaan dan hutang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian diperlukanlah perjanjian perkawinan sebagai pegangan bagi pasangan suami isteri untuk mengatur persoalan harta kekayaan dalam perkawinan jika timbul sengketa atau perselisihan. Dengan perjanjian perkawinan juga terdapat kepastian hukum mengenai hal yang diperjanjikan suami isteri untuk melakukan suatu perbuatan hukum tersebut.¹²

Secara umum perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pada pengaturan harta kekayaan. hal ini dikarenakan masih terpengaruh oleh budaya Barat yang bersifat

¹¹ <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-2189183/wanita-perlu-tahu-apa-saja-manfaat-perjanjian-pranikah>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 pukul 21.32 Wib

¹² H.A Damanhuri H.R. *Op.Cit.* h 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Individualistik dan mengutamakan nilai-nilai materi walaupun perjanjian dalam bentuk lain masih terbuka kemungkinan untuk diadakan. Dalam Islam hak kepemilikan terhadap harta sangat dihargai selama masih sejalan dengan tuntunan syari'at. Isi dari perjanjian perkawinan semakin berkembang dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat. Pemisahan harta kekayaan bukan satu-satunya isi dari perjanjian perkawinan akan tetapi menjadi lebih luas cakupannya untuk mengatur akibat hukum dalam perkawinan, seperti; larangan poligami, hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, pekerjaan masing-masing suami isteri, larangan para pihak dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan semua hal yang sekiranya dikhawatirkan terjadi selama perkawinan maupun setelah perkawinan. Menurut hukum perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, yaitu; hubungan antara suami dan isteri, harta benda dalam kekayaan, dan hubungan antara orang tua dan anak.¹³

Dalam tatanan Perundang-Undangan Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdiri dari empat ayat, yaitu;

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

¹³ Mulyadi, *Loc, cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan pasal tersebut kecuali *ta'liq thalaq* tidak disebutkan secara rinci hal-hal yang boleh atau tidak boleh diperjanjikan. Perjanjian dibuat secara tertulis atas persetujuan atau kehendak bersama kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan¹⁴. Ini berarti selain mengatur tentang harta kekayaan suami isteri, perjanjian perkawinan juga bisa memuat tentang larangan melakukan kekerasan, memberi nafkah yang baik, pemeliharaan anak jika pasangan bercerai, tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah, larangan poligami hingga untuk melindungi hak dan kewajiban suami-isteri. Perjanjian itu harus disahkan di depan Pegawai Pencatat Perkawinan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan serta tidak diperkenankan untuk merubah isi perjanjian tanpa ada persetujuan para pihak.

Pada tahun 1991 terkait dengan norma hukum perkawinan yang berdasarkan hukum Islam, melalui intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam persoalan *ta'liq thalaq* dimaksudkan juga sebagai salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan, hal itu di atur dalam Bab VII pasal 45-46 yaitu;

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing , 2002) h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. *Ta'liq thalaq*; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

1. Isi *ta'liq thalaq* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *ta'liq thalaq* betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama
3. Perjanjian *ta'liq thalaq* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali *ta'liq thalaq* diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Berdasarkan pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat berupa *ta'liq thalaq* (pergantungan talak) dan perjanjian-perjanjian lain yang di anggap baik untuk suami isteri selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ta'liq thalaq* yang berlaku sekarang disahkan oleh Kementrian Agama dalam bentuk perjanjian merupakan semacam ikrar dari suami terhadap isterinya yang diucap setelah ijab qabul dan ditandatangani sendiri oleh suami dan dalam rumusan tersebut disyaratkan adanya *`iwadh* (tebusan) yang harus diserahkan sendiri oleh isteri.¹⁵

Pada Kompilasi Hukum Islam juga disinggung tentang perjanjian perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Hal ini tercantum dalam pasal 47 yang terdiri dari tiga ayat, yaitu;

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan

¹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. Ke-9, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981) h. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Jika kita perhatikan pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh suami dan isteri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang mana perjanjian ini berlaku bagi setiap pihak termasuk pihak ketiga.¹⁶

Berbicara tentang Perundang-undangan maka tidak lepas dari peradilan. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ialah ranah dari Pengadilan Agama, suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan ini memiliki wewenang untuk mengadili, dan memutuskan perkara bagi orang yang beragama Islam dan hanya terkhusus untuk perkara perdata Islam saja.¹⁷

Lebih jelasnya kompetensi absolut Peradilan Agama dapat dilihat dalam ketentuan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu¹⁸;

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, shadaqah dan ekonomi syariah.”

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Op.cit*, h. 180

¹⁷ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h. 3

¹⁸ *Penjelasan UU No. 3 tahun 2006 tentang Kewenangan Peradilan Agama*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pemeluk agama mayoritas Negara ini, umat Islam sangat membutuhkan eksistensi dari sebuah lembaga Peradilan untuk menangani permasalahan perdata yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. Salah satu contohnya persoalan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh suami dan isteri pada waktu, sebelum atau setelah perkawinan, dan mereka pun sepakat untuk mematuhi dan memenuhi isi dari perjanjian yang mereka buat. Namun adakalanya suami maupun isteri tidak mematuhi dan melanggar isi dari perjanjian, hal demikian pun juga menjadi tugas Pengadilan Agama untuk menyelesaikan persoalannya ketika diajukan pembatalan nikah dan gugatan sebagai alasan perceraian. Peraturan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 51 sebagai berikut;

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Islam sebelumnya memang tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan tetapi praktik seperti perjanjian perkawinan (contohnya seperti calon istri boleh mengajukan syarat sebelum hari akad dan walimahan di adakan/pada saat dikhitbah/dilamar) memang sudah dikenal dalam Islam. seperti yang terjadi pada masa Umar bin Khattab, yaitu yang diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dari Abdurrahman bin Ghanam. Dia melihat seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab dan memberikan penjelasan bahwa ia telah menikahi seorang perempuan dengan syarat si perempuan akan mendapatkan rumahnya. Lalu Umar menanggapi “apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disyaratkan oleh perempuan itu maka ia berhak mendapatkannya”. Dengan rasa kesal laki-laki itu menjawab “dengan begitu kaum laki-laki bakal celaka karena perempuan bisa menceraikan suaminya, Umar menjawab “Orang Islam itu terikat dengan apa yang disyaratkan pada hal-hal yang terkait dengan hak-hak mereka.¹⁹

Dalam literatur fiqh klasik pun tidak ditemukan pembahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan, akan tetapi dibahas dengan sebutan “persyaratan dalam pernikahan”. Pembahasan tentang persyaratan pernikahan tersebut tidak sama dengan persyaratan pernikahan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh pada umumnya, karena yang dibahas dalam syarat pernikahan itu adalah syarat-syarat untuk sahnyanya suatu pernikahan. Sedangkan syarat dalam perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang tidak mempengaruhi sahnyanya perkawinan. Sedangkan kaitan antara syarat dalam pernikahan dengan perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian.²⁰

Secara global syarat dalam pernikahan ada yang diajukan sebelum akad dan syarat yang diajukan ketika prosesi akad, ulama fiqh memberikan pendapatnya tentang persyaratan dalam pernikahan, diantaranya; Menurut Mazhab Hanafi, syarat dalam pernikahan dibagi menjadi dua yakni syarat yang *shahih* dan syarat yang *fasid*. Adapun

¹⁹ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003) h. 158

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang *shahih* ialah syarat yang diajukan tidak bertentangan dengan *syari`at* dan itu harus dipenuhi. Sedangkan syarat yang *fasid* ialah syarat yang tidak sejalan dengan akad dan bertentangan dengan *syari`at* maka syaratnya menjadi batal dan akad nikahnya tetap sah.²¹

Menurut Mazhab Maliki terkait persyaratan dalam pernikahan, dibagi menjadi syarat yang benar dan syarat yang rusak. Syarat yang benar terdiri dari yang makruh dan yang tidak makruh, sedangkan syarat pernikahan yang rusak ialah syarat yang bertentangan dengan *syari`at* dan tujuan pernikahan.²²

Selanjutnya pandangan Mazhab Syafi`i, syarat dalam pernikahan juga dibagi menjadi dua macam yakni syarat yang *shahih* dan syarat yang *fasid*. Syarat yang *shahih* ialah yang sesuai dengan akad nikah sedangkan syarat yang *fasid* adalah syarat yang menyelisihi hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah dan tidak menyalahi maksud asli dari pernikahan yaitu bersenggama (*al-Istimta`*).²³

²¹ Syarat yang sesuai dengan syariat seperti seorang isteri yang meminta agar calon suaminya tak mengajaknya pergi jauh melainkan seizin keluarga. Adapun syarat yang *fasid* seperti disyaratkannya *khiyar* (memilih) bagi masing-masing dari keduanya untuk membatalkan pernikahan dalam waktu tertentu. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih Islāmi wa Adillātuahu*, juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikri, 1985) h. 54

²² Syarat pernikahan yang *shahih* namun makruh ialah syarat yang tidak bertentangan dengan akad hanya saja dapat mempersulit si calon suami, seperti tidak membawa si isteri keluar dari negaranya, agar tidak berpoligami dsb, syarat seperti ini tidak harus dipenuhi oleh si calon suami kecuali jika dibarengi dengan sumpah untuk menceraikan. Adapun syarat yang *shahih* dan tidak makruh ialah syarat yang sesuai dengan akad seperti suami yang harus berbuat baik kepada isteri dan isteri yang harus mentaati suaminya. Selanjutnya syarat pernikahan yang rusak ialah yang bertentangan dengan akad dan tujuan pernikahan seperti syarat jika terjadi perceraian maka nafkah isteri dibebankan kepada walinya atau kepada isteri itu sendiri, karenanya syarat semacam ini hukumnya tidak sah. *Ibid*, h. 55

²³ Syarat yang *shahih* seperti membagi jadwal di antara para isteri dan memberi nafkah. Adapun syarat yang tidak benar ialah syarat untuk tidak berpoligami, tidak memberi nafkah dsb. Syarat seperti ini membuat pernikahannya tetap sah akan tetapi syaratnya rusak dan menyalahi tujuan akad. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah Saw;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mazhab Hambali syarat dalam pernikahan itu sama seperti yang dikemukakan oleh Ulama sebelumnya, ada syarat yang *shahih* dan yang *fasid*. Syarat-syarat ini dibagi menjadi 3 bagian, pertama-syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Kedua-syaratnya batal dan akadnya sah. Ketiga-sesuatu yang asalnya membatalkan.²⁴

Imam Ibnu Qudamah (w.620 H) ketika berbicara tentang syarat dalam pernikahan sebagai mana termaktub dalam kitab *al-Mughnī* sependapat dengan Mazhab Hambali bahwa syarat yang memiliki manfaat dan faedah bagi isteri maka syarat seperti ini wajib untuk dipenuhi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw melalui Uqbah bin Amir:

حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أَحَقُّ مَا أُوفِيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ))²⁵

“Telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari al-Laist berkata telah diceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi al- Khair dari Uqbah bin Amir ra. telah berkata: Rasulullah Saw bersabda: Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan”. (HR.Bukhari)

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang bukan bersumber dari al-Qur’an adalah batil” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maharnya pun menjadi batal karena jika syaratnya menguntungkan isteri, ia tidak ridha dengan mahar yang disebutkan itu saja, namun jika merugikan isteri maka suami tidak ridha mengganti mahar yang disebutkan kecuali ketika apa yang disyaratkan itu sah. *Ibid* h. 56

²⁴ Syarat yang benar itu harus dipenuhi dan syari’at tidak melarangnya selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad, seperti syarat agar calon suami tidak poligami dan memberi nafkah kepada isteri demikian juga jika calon suami mensyaratkan calon isteri yang perawan, cantik dan terpelajar. Selanjutnya syarat yang batal seperti calon suami yang mensyaratkan tidak memberi mahar atau jika ia memberi mahar maka ia memintanya kembali demikian juga jika calon isteri mensyaratkan agar calon suami tidak *jima’* dengannya. Substansinya syarat seperti ini batal karena bertentangan dengan tujuan akad. Syarat yang pada asalnya membatalkan pernikahan seperti menikah dengan batas waktu tertentu yaitu nikah *mut’ah*, syarat seperti ini batil dan akadnya pun menjadi batal. Lihat *Ibid*, h. 57

²⁵ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz III, (Beirut: Dār al-‘Ilmi, t.th) h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebutkan syarat yang memiliki manfaat bagi isteri menurut Imam Ibnu Qudamah (w.620 H) seperti jika calon isteri mensyaratkan kepada calon suaminya agar tidak mengeluarkannya dari rumah/kampungnya dan tidak menikah lagi dengan perempuan lain, jika syarat ini tidak dipenuhi maka pernikahan mereka *fasakh* (batal).

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa Ulama sepakat syarat yang bertentangan dengan *syari`at* dan tujuan pernikahan maka syarat tersebut tidak sah akan tetapi akad nikahnya tetap sah. Sebaliknya syarat yang tidak bertentangan dengan *syari`at* dan tujuan pernikahan maka boleh atau sah dan harus dipenuhi. Ulama berbeda pendapat tentang syarat yang tidak bertentangan dengan *syari`at* dan memiliki manfaat bagi salah satu pihak namun syarat tersebut tidak mendukung tujuan pernikahan. Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama, yang pertama menurut Imam asy-Syāfi`i (w. 240 H) bahwa syarat yang *fasid* itu diantaranya persyaratan dari isteri bahwa ia boleh keluar rumah kapan saja ia mau, tidak dibawa keluar dari negaranya, dan tidak dipoligami. Hal ini tertuang dalam kitab *al-Umm*²⁶, yaitu:

ولو نكح بكرا أو ثيبا بأمرها على ألف على أن لذا أن تخرج متى شاءت من منزل، وعلى أن لا تخرج من بلدنا، وعلى أن لا ينكح عليها، ولا يتسر عليها أو أي شرط ما شرطتو عليو مدا كان لو إذا انعقد النكاح أن يفعلو ويدنعها منو، فالنكاح جائز والشرط باطل

“Apabila seorang laki-laki menikahi gadis atau janda dengan permintaan si istri bahwa ia boleh keluar rumahnya kapan saja ia mau, dia tidak boleh dikeluarkan dari negaranya, dan suaminya tidak boleh memadunya, atau

²⁶ Al-Imām Muhammad bin Idrīs Asy-Syāfi`i, *al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub, 2001),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap syarat yang mempunyai tuntutan baik ia untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka nikah tersebut sah, namun syaratnya batal.”

Berbeda hal dengan pendapat Imam Ibnu Qudamah (w.620 H), bahwa persyaratan dari istri untuk tidak dibawa perjalanan jauh dan tidak keluar dari negaranya serta untuk tidak dipoligami merupakan syarat yang shahih dan memiliki faedah untuk isteri sehingga harus dipenuhi oleh suami. Hal ini termuat dalam kitabnya *Al-Mughnī*²⁷;

مَا يُلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَهُوَ مَا يَعُودُ إِلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهَا، أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، فَهَذَا يُلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فُسْخُ الْتِكَاحِ. يُرَوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ شَرِيحٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَطَاوُسٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ

“Yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misal, sang suami tidak akan mengeluarkannya dari rumahnya/kampungnya, tidak akan menikah atasnya. Syarat seperti ini wajib ditepati oleh suami untuk istri, jika suami tidak menepati maka istri berhak untuk meminta dihapuskan nikahnya”. Hal seperti ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra, dan Sa’ad bin Abi Waqash, Muawiyah dan ‘Amru bin Ash Ra. Hal ini juga difatwakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus Ausal dan Ishaq.”

Ulama berbeda pendapat mengenai objek perjanjian yang termasuk kategori *shahih* dan *fasid*, dan juga berbeda mengenai perjanjian yang memiliki faedah untuk isteri apakah harus dipenuhi oleh suami atau tidak. Ulama sepakat bahwa syarat yang *shahih* harus dipenuhi dan syarat yang *fasid* tidak.

Terdapat dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan ini. Pertama, perjanjian ini bukanlah suatu keharusan, tanpa ada perjanjian

²⁷ Abi Muahammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughnī*, Juz 1 (Riyadh: Dār al-A’lam al-Kutub, 1997) h. 483

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan pun, perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian supaya terhindar dari terjadinya perselisihan di kemudian hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama, mengenai larangan poligami, hak dan kewajiban suami istri, dan perjanjian lain yang dikehendaki oleh pasangan suami istri. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut kendati pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan *syari`at*.²⁸

Berdasarkan paparan di atas perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami isteri untuk melindungi akibat dari perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka mengenai hal yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Hubungan suami isteri akan terasa harmonis, aman dan tentram karena jika suatu saat hubungan keduanya retak dan terjadi perceraian maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan hukum. Untuk itu, selain perlu adanya kejelasan tentang apa yang dimaksud perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, diperlukan juga tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga dan kerangka sistem hukum di Indonesia. Hal demikianlah yang membuat penulis tertarik untuk membahas pembahasan ini secara lebih rinci.

²⁸ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Prenada Media Group, 2004) h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut;

- 1) Bagaimana aturan Perjanjian Perkawinan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)?
- 2) Bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
- 3) Apa sajakah isi dari perjanjian perkawinan?
- 4) Apakah akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan terhadap pihak yang membuatnya?
- 5) Bagaimana praktik perjanjian perkawinan di negara Indonesia?
- 6) Apa saja tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan dalam kehidupan suami isteri?
- 7) Bagaimana konsep perjanjian perkawinan menurut Ulama fiqih?

2. Batasan Masalah

Dikarenakan banyaknya permasalahan terkait perjanjian perkawinan, maka agar pembahasan-pembahasan ini lebih terfokus kepada inti masalah yang dituju perlu adanya pembatasan masalah sebagai pedoman di dalam penulisan sesuai dengan masalah yang dibahas yaitu “Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah ini penulis hanya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap point-point perjanjian perkawinan pada pasal 29, perjanjian perkawinan yang dibahas pun ialah perjanjian yang telah dicatat pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, rumusan masalah yang dari tema yang penulis angkat mengenai **“Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam”** ialah:

- 1) Bagaimana aturan Perjanjian Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- 2) Bagaimana ketentuan Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau menurut Hukum Islam?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya ialah:

- a. Untuk mengetahui aturan perjanjian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan perjanjian perkawinan pada pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau menurut Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata Islam yang berkenaan dengan Hukum Keluarga Islam. Diharapkan pula dapat memberikan informasi terkait Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam bidang akademik dan masyarakat luas, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat kepada para praktisi Hukum Islam dan pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan Hukum Islam
- 3) Bagi peneliti, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika/Teknik Penulisan

Pembahasan dalam Tesis ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Secara garis besar penelitian ini akan membahas dan menguraikan masalah yang disusun dalam lima bab dan setiap bab terdiri atas beberapa pembahasan, hal ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika Tesis dengan judul *Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam* ialah;

Bab I Pendahuluan; terdiri dari 5 sub bahasan yaitu latar belakang suatu masalah yang kemudian akan dirumuskan permasalahannya untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang tujuannya untuk memberikan gambaran umum mengenai kerangka pembahasan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka; pada bab ini terdiri laporan penelitian terdahulu yang dikutip dari jurnal ilmiah terkait, landasan teori yang berisikan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang serta perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang. Pada bab ini juga dipaparkan definisi operasional penelitian.

Bab III Metode Penelitian; memaparkan metode penelitian yang dipakai dan menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV Temuan dan Pembahasan; berisi pembahasan dan hasil penelitian mengenai aturan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan perjanjian perkawinan pada pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau menurut hukum Islam. Adapun sub bab pada bab IV ini akan disesuaikan dengan sub tema dalam pembahasan

Bab V Penutup; yaitu pemaparan terkait kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran serta rekomendasi dari hasil penelitian. Pembaca akan mudah menemukan fokus pembahasan dengan adanya kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif diperlukan dukungan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan memiliki relevansi yang hampir senada. Penelitian terkait perjanjian perkawinan bukanlah penelitian yang baru dalam bidang hukum keluarga (*al-akhwāl asy-syakhsiyyah*), telah banyak penelitian terdahulu yang dilakukan namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Hukum Islam. diantara penelitian tersebut ialah;

Pertama, penelitian oleh Umar Ma'ruf, seorang Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dan penelitian hukum kepustakaan. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara dengan Notaris di Kota Semarang terkait pembahasan. Dalam Jurnal ini menjelaskan tentang perjanjian terhadap harta merupakan perlindungan bagi isteri terhadap kemungkinannya dipertanggung jawabkannya harta tersebut atas hutang-hutang suami ataupun sebaliknya. Sehingga dapat mengurus sendiri harta masing-masing dan terhindar dari tindakan *beheer*. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap harta itu dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beragam Islam hanya dapat dilakukan sebelum, saat dan setelah perkawinan dilangsungkan. Wewenang dan tanggung jawabnya pun sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara. Akan tetapi jika tidak memenuhi syarat maka akta tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh hakim.²⁹

Kedua, penelitian oleh Burhanudin H dan Toto Susmono, seorang Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul *“Pemisahan Harta Perkawinan Melalui Permohonan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Studi Kasus)”*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah, (1) Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan permohonan penetapan pemisahan harta perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan, (2) Bagaimana kedudukan penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, (3) Apa akibat hukum dari penetapan Hakim Pengadilan Surakarta berdasarkan penetapan Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, adapun teknik pengumpulan studi kepustakaan dan analisi bahan hukum dengan penalaran deduksi. Dalam bahasan ini disimpulkan tentang dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut ialah; adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon mengenai perjanjian perkawinan serta adanya keinginan hak untuk memiliki tanah mengingat ini ialah pernikahan campuran. Penetapan

²⁹ Umar Ma'ruf, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, h. 270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim ini menjadi terobosan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Akibat dari penetapan Hakim ini ialah; suami dan isteri yang membuatnya mesti mentaati kesepakatan, harta suami-isteri yang sebelumnya adalah harta bersama maka menjadi harta masing-masing pihak dan penetapan ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang bersangkutan.³⁰

Ketiga, penelitian oleh Firdaus Albar, seorang Dosen tetap Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto dengan judul “*Perjanjian Pra-Nikah: Solusi Bagi Wanita*”. Permasalahan dalam penelitian ini ialah harmonisasi keluarga bisa terganggu dengan fenomena poligami, walaupun secara normatif poligami diakui oleh hukum Islam. Karena itu di wacanakan bagaimana bila perjanjian pranikah berisi klausul syarat suami tidak berpoligami. Hasil penelitian dipaparkan bahwa perjanjian ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan suatu keluarga, karena tidak sedikit isteri yang tidak ingin dimadu. Daripada berpoligami mengundang keretakan rumah tangga, maka akan lebih baik dilakukan perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sangat sah bagi seorang wanita untuk membuat perjanjian kepada calon suaminya selama itu tidak melanggar syariat dan untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban suami isteri agar tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³¹

Keempat, penelitian oleh Ru’fah Abdullah, seorang Dosen tetap Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin

³⁰ Burhanuddin H dan Toto Susmono, *Pemisahan Harta Perkawinan Melalui Permohonan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Studi Kasus)*, Volume III No. 2 Juli-Desember 2016, h.

³¹ Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, *Perjanjian Pra-Nikah: Solusi Bagi Wanita*, Vol. 3 No. Januari-Juni 2008, h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banten dengan judul “*Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*”. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan rumah tangga serta menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan referensi tradisi keislaman dan dikombinasikan dengan Undang-undang. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Fiqih perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah persyaratan dalam pernikahan, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebagaimana memenuhi perjanjian-perjanjian yang lain bahkan syarat yang lebih berhak untuk dilaksanakan ialah persyaratan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti sabda Rasulullah Saw:

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تَوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه البخاري في صحيحه)

“*Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin*” (HR. Bukhāri)

Adapun persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal maka persyaratan tersebut tidak boleh untuk dipenuhi. Selanjutnya perjanjian perkawinan dalam perundang-undangan di atur dalam pasal 29 UU. No. 1 Tahun 1974 dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 29 UU. No. 1 tahun 1974 perjanjian perkawinan dapat berupa apa saja dan disahkan selama tidak melanggar batas hukum dan norma kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan dapat diadakan dalam bentuk *ta'liq thalaq* dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu di atur juga perjanjian mengenai harta bersama sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.³²

Kelima, penelitian oleh Rini dengan judul “*Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)*”. Rumusan masalahnya yaitu; (1) Apakah perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perjanjian perkawinan? Jenis penelitian ini ialah kepustakaan atau lebih spesifiknya penelitian hukum normatif dalam kerangka perspektif hukum Islam. Kesimpulannya ialah jika perjanjian tersebut berbentuk *ta'liq thalaq* maka itu belum bisa dijadikan sebagai instrumen pencegahan kekerasan dalam rumah tangga karena *ta'liq thalaq* hanya perjanjian sepihak yang diucapkan oleh suami. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan *maqāshid syarī'ah* dan menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban suami-isteri, karena itu diperlukan pencegahan yaitu dengan mengadakan perjanjian perkawinan.³³

Setelah ditelaah mengenai studi yang telah lebih dulu membahas tentang perjanjian perkawinan, belum ada yang secara tegas menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan pada pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau menurut Hukum Islam dan juga terdapat perbedaan fokus di antara

³² Ru'fah Abdullah, *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016, h. 38-42

³³ Rini, *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 12 No. 2, Desember 2016, h. 185-195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelima studi di atas dengan tema yang akan di teliti. Umar Ma'ruf memfokuskan studinya tentang perjanjian perkawinan sebagai perlindungan terhadap harta suami maupun isteri yang dibuat oleh notaris. Selanjutnya Burhanudin H dan Toto Susmono memfokuskan studinya pada alasan penetapan Hakim Agama dalam memutuskan permohonan pemisah harta setelah perkawinan. Firdaus Albar memfokuskan studinya pada perjanjian perkawinan sebagai perlindungan terhadap isteri dengan meminta suami untuk tidak berpoligami. Ru'fah Abdullah memfokuskan studinya dengan penjabaran perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan Perundang-undangan. Yang terakhir Rini, memfokuskan studinya tentang perjanjian perkawinan yang dijadikan sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian terdapat celah bagi penulis untuk memfokuskan studi ini pada penjelasan perjanjian perkawinan pada pasal 29 undang-undang no. 1 tahun 1974 menurut hukum Islam.

Landasan Teori

1. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan dalam Islam disebut pernikahan atau nikah (*zawāj*) artinya saling memasukkan, menindas dan berkumpul, semakna dengan *al-jam'u* (الجمع), *al-wath'u* (الوطاء), dan *adh-dhammu* (الضم). *Al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a* - *yajma'u* - *jam'an* (جمع – يجمع) (جمعاً) –berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.³⁴ Adapun *Adh-dhammu*, berasal dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* – ضم) (ضم – ضم) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Sedangkan *Al-wath'u* terambil dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ – يطأ – وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.³⁵

Definisi nikah secara bahasa semata-mata bersenggama atau bercampur. Kata nikah memiliki arti asli (*haqiqat*) yaitu persetubuhan dan arti kiasan (*majazi*) yaitu akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri.³⁶ Dalam al-Qur'an kata nikah hanya dimaksudkan tentang hal akad, dan mayoritas penggunaan kata nikah dalam bahasa sehari-hari mengacu pula pada makna kiasan yaitu akad.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam Islam istilah perkawinan disebut dengan pernikahan yang merupakan *sunnatullah* untuk makhluk agar dapat melestarikan kehidupan dan berkembang biak, serta melanjutkan keturunan sesuai dengan cara yang benar menurut Allah Swt. Perkawinan menjadi jalan terbaik untuk menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari penyakit kelamin yang mematikan

³⁴ Ahmad Wardon, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1979) h. 208

³⁵ *Ibid*, h. 1566

³⁶ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Ind Hillco, 1990) h 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh hubungan intim yang tidak pada aturannya. Dengan perkawinan dapat terhindar dari fitnah perzinahan dan menjaga pandangan dari hal-hal buruk, karena itulah perkawinan merupakan perintah agama untuk segera ditunaikan bagi yang mampu.

Pengertian perkawinan secara istilah merupakan akad yang dengannya seorang laki-laki halal untuk melakukan hubungan seksual (*istimta'*) dengan seorang wanita selama bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi sebab sepersusuan dan keturunan.³⁷

Ulama fiqih memberikan definisi mengenai perkawinan, diantaranya: Perkawinan ialah sunnatullah yang berlaku bagi makhluk Allah Swt baik manusia, hewan dan tumbuhan ini menurut Sayyid Sabiq.³⁸ Menurut Ulama Hanafiyyah nikah merupakan akad yang bermanfaat untuk memiliki *mut'ah* (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja. Maksud memiliki disini ialah memiliki dari segi manfaat untuk melakukan hubungan seksual (*istimta'*). Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa nikah ialah akad *mut'ah* untuk mencapai kepuasan yang sebelumnya tidak ditentukan secara jelas maharnya serta tidak keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Qur'an atau ijma'. Selanjutnya menurut Ulama Syafi'iyyah nikah adalah akad kepemilikan untuk bersenggama dengan menggunakan lafaz *ankāha*, *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya untuk maksud "*milku al-intifa'*" (kepemilikan manfaat) agar

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 4

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz. 2, (Kairo: al-Fatih al-I'lam al-'Arabiyy, t.th) h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa bersenang-senang. Pandangan Ulama Hanabilah bahwa nikah adalah akad dengan lafaz *ankāha* atau *tazwīj* atas manfaat untuk bersenang-senang (*istimta'*).³⁹ Menurut Imam Yahya, murid Imam Abu Hanifah (w.148 H) pengertian nikah itu bersatunya antara akad dan bersenggama. Berdasarkan pendapat ini Abu Kasim az-Zujazi dan al-Farisy berkata; jika seseorang mengatakan telah menikahi si Fulanah atau anak si Fulan maka maksud nikah disini adalah akad, namun jika dikatakan bahwa suami menikahi isterinya maka yang dimaksud ialah bersenggama.⁴⁰ Menurut Abu Zahrah dalam Kitab *al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah* nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang saling membantu dan keduanya menentukan sesuatu sesuai hak dan kewaajiban masing-masing.⁴¹ Muhammad Syahrur seorang ulama kontemporer mendefinisikan bahwa perkawinan ialah suatu keadaan berkumpulnya laki-laki dan perempuan dengan tujuan lahiriyah, bersenggama, keinginan memiliki anak, membentuk keluarga dan hidup berdampingan.⁴² Secara garis besar menurut ulama fiqih nikah itu ialah akad (perjanjian) yang memiliki manfaat untuk halalnya melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita.

³⁹ Abdurrahman al-Jaziiri, *Kitāb Fiqih 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003) h. 8-9

⁴⁰ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juzu' 4, (Mesir: Musthafa al-Babil Halabi wa Auladuhu, t.th) h. 227

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah*, (t.t. Daar al-Fikr al Arabia, 1948) h. 19

⁴² Muhammad Syahrur, *Nahwu Ushūl Jadīdah lilfiqhi al-Islāmī, Fiqih al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahālī lil Tauzī', 2000) h. 308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan berbagai definisi perkawinan atau pernikahan di atas, terdapat kesamaan walaupun memiliki redaksi yang berbeda. Perkawinan itu suatu ikatan atau akad yang memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga membuat seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri dan halal melakukan hubungan seksual (*jima'*) dengan tujuan memiliki keturunan, membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan diridhai Allah Swt. Akad perkawinan ini berpengaruh bagi laki-laki untuk menghalalkan dan memberi hak kepemilikan perempuan atau isterinya secara utuh namun bagi perempuan sekedar menghalalkan laki-laki atau suaminya saja tidak ada hak kepemilikan secara utuh. Inilah mengapa poligami dibolehkan sementara poliandri dilarang, karena dalam poligami hak kepemilikan atas suami merupakan hak atas semua isteri-isterinya.

2. Syariat Perkawinan

Allah Swt mensyariatkan perkawinan kepada hamba-Nya tak lepas karena adanya tujuan-tujuan untuk kelangsungan hidup di dunia maupun di akhirat. Begitu juga karena Allah Swt telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sehingga menjadi fitrah bagi manusia untuk melengkapi kehidupan dengan pasangannya melalui perkawinan. Rahasia yang Allah Swt peruntukkan bagi makhluk-Nya melalui perkawinan agar mereka menjadi tentram, tenang dan damai dalam kehidupan dunia. Beberapa firman Allah Swt yang menunjukkan disyariatkannya perkawinan ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum: 21)”⁴³

Berdasarkan firman Allah di atas, ada 3 macam yang hendak dituju dari perkawinan yaitu;

- a. لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا (untuk menemukan ketenangan padanya)
- b. مَوَدَّةً (membangun rasa cinta), kata *mawaddah* berasal dari kata *wadda* yang artinya meluap-lupa, tidak terkendali dan tiba-tiba. Pasangan muda cenderung merasakan cinta yang meluap-luap dan tidak terkendali apalagi jika itu dilakukan diluar pernikahan maka akan menimbulkan fitnah dan sesetu yang berbenturan dengan agama.
- c. رَحْمَةً (rasa kasih sayang), semakin bertambahnya usia maka rasa kasih sayang dalam diri seseorang pada pasangannya akan semakin tinggi dan gejolak cinta yang tak terkendali itu mulai memudar. Rasa sayang itu tidak ada kandungan rasa cemburu buta. Dalam pernikahan pasangan mula-mula merasakan ketenangan pada pasangan, lalu ditumbuhkanlah rasa cinta hingga rasa sayang yang

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Ponegoro, 2010) h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terus berkelanjutan sampai usia tak lagi muda, karena itulah perkawinan di syari'atkan bagi anak cucu Adam.⁴⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya. Lalu Allah mengembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dnegan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. an-Nisa': 1) ”⁴⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu untuk berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu tidak akan mampu berbuat adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.” (Q.S.An-Nisa': 3) ”⁴⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.” (Q.S.An-Nuur': 32) ”⁴⁷

Ayat 32 surat an-Nuur di atas bermakna hendaklah membantu seseorang yang akan menikah baik itu dengan harta ataupun

⁴⁴ A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topoik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Shubuh*, (t.t, 2006) h. 86-88

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Op.cit*, h. 77

⁴⁶ *Ibid*, h. 77

⁴⁷ *Ibid*, h. 354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan jalannya. Dan bagi para wali hendaklah mengawinkan orang-orang yang berada dalam perwaliannya begitupun bagi tuan agar mengawinkan budak-budaknya. Perintah menikah ini menjadi wajib jika dikhawatirkan akan terjadinya fitnah ataupun perzinahan apabila belum menikah.⁴⁸ Ayat ini juga memberi penekanan agar persoalan harta tidak menjadi penghalang perkawinan, sebab Allah Swt telah menjanjikan untuk memberikan kecukupan rezeki kepada orang yang mencari ridha Allah dan menghindari fitnah dengan menikah.

Ada juga beberapa hadits Rasulullah Saw yang menerangkan disyari'atkannya perkawinan:

عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء (رواه الجماعة)⁴⁹

"Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah)"

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan berdasarkan hadits di atas siapapun yang telah memiliki kemampuan (*bā'ah*) baik secara jasmani dan rohani hendaklah untuk segera menikah. Karena menikah bisa membuat seseorang terhindar dari perbuatan yang

⁴⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Jakarta: Toha Putra, 1993) h. 186

⁴⁹ Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz IV/III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabia, 1373) h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan *syara'* dan jika belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa.⁵⁰ Ulama mengelompokkan makna *bā'ah* dalam dua pendapat; pendapat pertama mengartikan *bā'ah* sebagai *jima'*. Jadi makna *bā'ah* dalam hadits di atas adalah orang yang telah mampu ber-*jima'* dan mampu memberi nafkah lahir bathin maka dianjurkan untuk menikah. Pendapat kedua makna *bā'ah* adalah beban pernikahan, dalam Syarh Sahih Muslim Imam Nawawi mengutip pendapat dari Qadhi Iyadh bahwa *bā'ah* atau *al-mabā'ah* berarti rumah atau tempat. Ini karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.⁵¹ Sabda Rasulullah lainnya ialah;

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لا، قال: تزوّج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء (رواه أحمد والبخاري)⁵²

“Dari Sa’id bin Jubair, dia berkata: “Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: “Apakah kamu telah menikah?”. Aku menjawab: “Belum”. Ibnu Abbas berkata: “Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya”. (HR. Ahmad dan Al-Bukhāri)”

حد ثنا أحمد بن يونس حد ثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب: سمع سعد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص قال: ردّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم على عثمان بن مظعون التبتّل ولو أذن له لاختصينا (رواه البخاري والمسلم)

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrāhīm bin Sa’ad, dari Ibnu Syihāb: Sa’ad bin Musayyab berkata, aku telah mendengar dari Sa’ad bin Abi Waqqāsh, dia berkata: “Rasulullah Saw pernah melarang Utsman bin Ma’zhūn membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah Saw mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri”. (HR. Al Bukhāri dan Muslim)⁵³

⁵⁰ M. Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008) h. 7

⁵¹ Imam Nawawi, *Shahih Muslim bī Syarh an-Nawawi*, Juz IX, (t.t: Daar al-Fikr, 1981) h.

⁵² Hadits No. 4681, https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=

⁵³ Imam Bukhari, *Op.cit*, h. 1952

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disyari'atkannya perkawinan juga bisa diterima berdasarkan akal logika manusia, karena bumi ciptaan Allah Swt yang kelilingnya mencapai 40.000 km dengan garis tengah 12.500 km mesti di kelola oleh manusia dalam jumlah yang banyak. Perkawinan menjadi jalan untuk meningkatkan jumlah manusia agar terwujudnya ketertiban karena dengan perkawinan nasab anak yang lahir akan jelas. Dari perkawinan juga kan mewujudkan ketertiban dalam hal warisan, ketika seorang manusia wafat tentulah harus ada ahli waris yang menerima, mengurus dan menampung hartanya.⁵⁴

Ulama fiqih berpendapat berdasarkan dasar hukum pernikahan tersebut, bahwa hukum nikah dapat bergeser dari sunnah menjadi wajib, mubah, makruh bahkan haram tergantung pada niat, situasi dan kondisi yang bersangkutan. Apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk menikah baik dari segi lahir maupun bathin, dan sekiranya tidak menikah ia masih mampu memelihara diri dari perbuatan zina maka sunnah baginya untuk menikah karena Rasulullah melarang hidup sendirian. Seseorang yang dihukum wajib untuk menikah apabila secara materi dan jasmani telah sanggup dan dia merasa khawatir jika tidak menikah akan terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt yaitu perzinahan.⁵⁵ Seseorang boleh menikah dan boleh tidak menikah apabila tidak ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk menikah dan tidak pula memiliki halangan, dalam situasi ini berlaku baginya hukum

⁵⁴ Hasan M Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Media, 2003) h. 123

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asal yaitu boleh (*mubah*). Adapun jika seseorang memiliki nafsu lemah dan dikhawatirkan tidak bisa mencapai tujuan lahir dan bathin pernikahan, atau tidak memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah biologis kepada isterinya maka baginya makruh dan dianjurkan sebaiknya untuk tidak menikah.⁵⁶ Selanjutnya hukum pernikahan bisa menjadi haram apabila tidak memiliki kesanggupan untuk kawin serta niat pernikahan itu untuk menganiaya dan menyakiti isteri.⁵⁷ Sebab Allah Swt telah berfirman;

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

*“..Janganlah kamu merujuki wanita untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiayanya. Siapa saja yang berbuat demikian maka sesungguhnya ialah telah berbuat shalim terhadap dirinya sendiri...(QS. Al-Baqarah: 231)”*⁵⁸

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Secara global tujuan dan hikmah perkawinan itu dapat dibedakan bahwa tujuan adalah yang hendak dicapai secara nyata dalam perkawinan sedangkan hikmah merupakan rahasia yang terkandung dalam syariat perkawinan. Dalil di atas menunjukkan poin penting mengenai tujuan dan hikmah dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam ialah:

- 1) Untuk melanjutkan keturunan yang sah sesuai syari`at, karena perkawinan menjadi penyalur syahwat seksual yang benar sehingga

⁵⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Op.cit*, h. 24

⁵⁷ Wahbah az-Zuhailī, *Op.cit*, h. 31

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Op.cit*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi naluri manusia untuk memiliki keturunan yang beriman dan sholeh agar menjadi amal jariyyah bagi orangtuanya⁵⁹ Rasulullah Saw bangga dengan umatnya yang banyak pada hari kiamat melalui perkawinan yang sah karena dengan jumlah yang banyak dan berkualitas.

- 2) Memelihara diri dari perbuatan zina, sangat manusiawi jika memiliki hasrat kepada lawan jenis dan hasrat untuk pemuasan nafsu syahwat. Dengan perkawinan manusia bisa terhindar agar jangan terjerumus ke lembah kejahatan (perzinahan) dan dapat menyalurkan hasrat seksual sesuai dengan jalan yang disyari'atkan Allah Swt, dan mereka dapat saling mencintai, hidup dalam kedamaian, kenyamanan dan kebahagiaan.⁶⁰
- 3) Menjaga kemurnian nasab, Perkawinan menjadi pembeda antara manusia dan hewan, karena manusia merupakan makhluk berakal maka harus di atur bagaimana menyalurkan nafsu seksual secara benar, melalui syariat perkawinan. Dalam dunia perhewan, tidak ada aturan yang mengikat dalam menyalurkan hasrat seksual, bisa terjadi dalam keadaan apapun dan dengan siapapun sehingga tidak diketahui nasabnya. Namun dengan perkawinan manusia dapat mewujudkan keteraturan dan kemurnian nasabnya karena adanya larangan poliandri (isteri memiliki suami lebih dari satu). Karena akal dan hati nurani yang membuat manusia tidak seperti hewan

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.* h. 46-47

⁶⁰ Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hendaklah mereka mengikuti akal dan nurani mereka untuk senantiasa berada dalam jalan yang diridhai Allah Swt, termasuk tidak menganggap enteng syariat perkawinan ini karena bisa menjaga keturunan (*hifz an-Nasl*) yang merupakan hal pokok dalam kehidupan.

- 4) Menjaga pandangan, siapapun memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu atau seseorang yang menarik apalagi orang yang belum menikah pikiran dan nuraninya masih labil karena tidak ada tempat yang sah untuk menyalurkan nafsu syahwatnya. Maka dari itu menikah sangat dianjurkan bagi yang telah mampu dan bagi yang belum mampu dianjurkan untuk berpuasa.
- 5) Mendapatkan ketenangan dan rasa kasih sayang dalam keluarga, sesuai dengan Firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rūm ayat 21. Bagi perempuan yang telah menikah secara kodrat dianugerahkan oleh Tuhan naluri keibuan untuk menaungi anak-anaknya yang merupakan amanah dari Tuhan dan harus dijaga, dibesarkan, diasuh, serta dirawat hingga anak yang semulanya tak berdaya menjadi aman dan asuhan ibunya dan dapat mandiri

Imam al-Ghazali (w.505 H) juga menguraikan tentang tujuan dari perkawinan, yaitu: melanjutkan keturunan, menyalurkan hasrat manusiawi, menjaga diri dari kerusakan, menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap keluarga dengan mencari rezeki yang halal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur rumah tangga yang merupakan pokok dari masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶¹

Perkawinan bagi umat Islam memiliki unsur-unsur sebagai tuntutan pelaksanaannya dan harus dipenuhi,⁶² yaitu;

- 1) Perkawinan harus dilangsungkan antara lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan sesama laki-laki atau sesama perempuan akan dilaknat
- 2) Setelah perkawinan dilangsungkan laki-laki dan perempuan berubah status menjadi suami isteri yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban
- 3) Halalnya melakukan hubungan badan antara suami isteri, akan ada hubungannya dengan `iddah jika terjadi perceraian dan hak untuk mewarisi
- 4) Tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Perkawinan yang Allah Swt syariatkan dan menjadi sunnah Rasulullah Saw menjadi sangat indah bila dilaksanakan dengan keteguhan iman dan semata mengharap ridha-Nya. Karena keluarga merupakan hal yang paling pokok dalam masyarakat maka keluarga harus dibangun melalui perkawinan yang sah agar lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

⁶¹ Imam Ghazali, *Ihyā Ulumuddīn*, Juz 2 (Semarang: Usaha Keluarga, t.th) h. 25

⁶² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah nya melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud rukun ialah sesuatu yang harus ada pada sesuatu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Tidak sempurna (tidak terjadi) perkawinan jika rukun-rukunnya tidak terpenuhi karena rukun ialah sah yang berhubungan langsung dengan hakikat perkawinan. Sedangkan syarat menurut Abdul Wahab Khallaf ialah sesuatu keberadaan hukum tergantung pada sesautu tersebut dan ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut.⁶³ Diantara rukun perkawinan ialah; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sementara syarat perkawinan bersangkut paut dengan rukun perkawinan yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, antara lain;

Calon suami atau mempelai laki-laki ialah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syaratnya harus beragama Islam, jelas laki-laki dan orangnya, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang berihram haji/umrah, dipastikan tidak memiliki isteri empat orang atau lebih termasuk isteri yang sedang menjalani masa *`iddah* talak *raj`i*, tidak memiliki isteri yang haram dimadu dengan calon isteri, tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dengan calon isterinya dan menikah dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

⁶³ Abd al-Wahhab Khalāf, *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978) h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Calon isteri atau mempelai perempuan merupakan para pihak yang juga akan melangsungkan perkawinan dengan persetujuan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Harus beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, jelas perempuan dan orangnya, menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya, tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan dan semenda dengan calon suaminya dan tidak dalam keadaan berihram haji/umrah. Sebelum melangsungkan perkawinan calon isteri harus dipastikan bahwa dia tidak berstatus sebagai isteri orang atau sedang berada dalam masa `iddah.⁶⁴

Istilah fiqih menjelaskan bahwa wali ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melindungi yang berada dalam kuasanya dan karenanya urusan seseorang dapat terpenuhi sebagai pengganti dirinya. Adapun wali nikah ialah pihak dari mempelai perempuan yang akan mengucapkan ijab kepada calon mempelai laki-laki. Seorang wali harus beragama Islam, laki-laki, berakal, baligh, adil, tidak sedang berihram haji/umrah, tidak *fasiq* dan tidak dalam keadaan terpaksa saat upacara pernikahan.

Kemaslahatan yang akan terwujud dengan adanya dua orang saksi ialah terhindarnya calon mempelai dari dugaan-dugaan jahat karena ada saksi yang meyakini sahnya perkawinan mereka. Para saksi memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu; beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, *murū'ah*, tidak *fasiq*, tidak pelupa, tidak bisu, tidak tuli, tidak

⁶⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid 1, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999) h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buta dan memahami arti serta makna ijab qabul.⁶⁵ Dalam hal seorang saksi yang buta maka ia harus mengenal dengan baik suara orang yang melakukan ijab dan qabul sehingga terhindar dari keraguan.⁶⁶

Selanjutnya shighat akad nikah dengan kata “nikah” atau “*tazwij*” atau terjemahannya. Shighat berupa ijab pernyataan dari wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki bahwa mempelai perempuan bersedia untuk menikah dan qabul ialah jawaban dari mempelai laki-laki bahwa ia menerima mempelai perempuan sebagai isterinya. Pengucapan ijab dan qabul harus ada kesesuaian, kecocokan, bersahutan dan tidak boleh di skip dengan hal-hal lain, diucapkan dengan lafadz yang jelas dan tegas, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dengan kata-kata kiasan atau sindiran sebab kata kiasan itu tersembunyi dan memerlukan niat serta keterangan lagi, tidak digantungkan dengan sesuatu, dan bisa didengar dengan baik oleh hadirin.⁶⁷

Lafaz ijab dan qabul ada yang telah disepakati atas sah atau tidaknya untuk menikah dan ada juga yang masih diperselisihkan. Para ahli fiqih sepakat dengan lafaz “aku nikahkan” atau “aku kawinkan” sebagai keabsahan lafaz ijab qabul dalam perkawinan karena berdasarkan teks al-Qur’an surat al-Ahzab: 37 yang artinya; “*Dan kami telah mengawinkan dia*” dan dalam surat an-Nisa’:22 yang artinya; “*Dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian*”. Adapun yang telah telah disepakati oleh ahli fiqih

⁶⁵ Zahry Hamid, *Op. cit*, h. 24-28

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Op. cit*, h. 23

⁶⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op. Cit*. h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan ketidak absahannya dalam perkawinan seperti lafaz meminjamkan, menyewakan, menggadaikan bersenang-senang sementara dan sebagainya. Sedangkan lafaz yang masih diperselisihkan seperti lafaz menjual, memberi, menghadiahkan ataupun yang menunjukkan akan pemberian hak milik pada masa sekarang dan selamanya.

Golongan Ulama Malikiyyah menambahkan mahar sebagai rukun pernikahan yang mesti ada wujudnya namun tidak disyaratkan untuk diucapkan ketika akad.⁶⁸ Mahar sebagai rukun nikah disamakan dengan akad dalam jual beli yaitu terdapat barang yang harganya telah disepakati untuk diperjualbelikan (*al-ma'qud `alaih*), karenanya agar akad jual beli menjadi sah maka setiap rukun harus dipenuhi begitu pula dengan akad nikah. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyyah rukun nikah itu hanya satu yaitu *shighat* nikah (ijab dan qabul).

5. Syarat-syarat Perkawinan

Seluruh hukum perkawinan akan melekat dalam perkawinan jika syarat sahnya itu terpenuhi, yakni:

- 1) Persetujuan calon suami dan calon isteri. Hal ini sangat diperlukan karena perkawinan merupakan ibadah terlama yang akan dilakukan

⁶⁸ Abdurrahman al-Jazīri, *Op.cit.* h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dengan adanya persetujuan, calon suami dan calon isteri dapat dengan senang hati dan sukarela dalam membangun rumah tangga. Dengan begitu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* akan tercapai.⁶⁹

- 2) Adanya wali nikah. Mengenai apakah wali termasuk syarat dalam perkawinan terjadi perbedaan pendapat ulama, Imam Malik (w. 179 H) berpendapat wali termasuk kepada syarat sah perkawinan jadi perkawinan menjadi tidak sah jika tidak adanya wali. Menurut Imam asy Syafi'i (w.204 H), Imam Abu Hanifah (w.148 H), Zufar, Sya'bi, dan Az-Zuhri jika seorang wanita melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki yang setara (*sekufu'*) dengannya tanpa adanya wali maka itu dibolehkan. Selanjutnya menurut Daud, jika seorang gadis yang akan menikah disyaratkan adanya wali dan jika janda tidak disyaratkan adanya wali.⁷⁰
- 3) Tidak menikah beda agama
- 4) Halalnya seorang wanita untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dalam arti lain si wanita tidak termasuk wanita yang haram dinikahi baik bersifat sementara maupun selama-lamanya, sebab hubungan persusuan, hubungan darah dan hubungan semenda

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Rajawali Pers, 2013), h. 57

⁷⁰ Al-Imām al-Qādhī Abu al-Walīd Muhammad Ibn Ahmad bin Muhammad Ibn Ahmad bin Rusyd al-Qurthubī an-Andalusī, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Juz 2 (Kairo, al-Maktabah al-Khojabyi, 1994) h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Saksi dalam perkawinan yang mencakup hukum kesaksian.⁷¹

Keberadaan saksi dalam perkawinan itu mutlak karena jika perkawinan dilangsungkan tanpa hadirnya dua orang saksi maka akibat hukumnya pernikahan tidak sah. Saksi menjadi antisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga mempelai dikemudian hari dan jika ada perselisihan antara suami isteri yang diajukan ke Pengadilan, saksi dapat diminta penjelasan terkait pemeriksaan perkara sebagai orang yang menyaksikan akad nikah.⁷²

2. Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan kata turunan dari kata dasar kawin yang secara bahasa berarti dibawa, dipukul dan diboyong kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno *ka-win* atau *kahwin*.⁷³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁷⁴

Istilah kawin secara umum digunakan untuk manusia, tumbuhan, hewan dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan

⁷¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqhi an-Nisa' (Fiqh Wanita Edisi Lengkap)*. Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016) h. 429

⁷² Ahmad Rofiq, *Op.cit*, h. 74

⁷³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 07.24 Wib

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet., Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). h. 518.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata nikah yang hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan agama.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dikatakan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin karena suami isteri memiliki suatu hubungan hukum untuk hidup bersama yang disebut juga dengan hubungan formil dimaksudkan sebagai segala hal yang bersifat duniawi (nyata) inilah makna ikatan lahir, sedangkan ikatan batin bukanlah hubungan formil dan bersifat spiritual (tidak nyata) akan tetapi sangat berpengaruh pada permulaan diadakannya perkawinan dengan adanya kecenderungan masing-masing pihak terhadap pihak lainnya kemudian lanjut dengan kerukunan dan tanggung jawab dalam berumah tangga hingga berkembang menjadi inti dari ikatan lahir.⁷⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan pasal 3 perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīdzan*) untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

⁷⁵ K. Wantjik Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980) h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada bab 4 pasal 26 memandang perkawinan itu hanya sebatas hubungan-hubungan perdata saja. Dalam pasal 81 disebutkan bahwa tidak boleh ada upacara keagamaan yang diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Terdapat perbedaan prinsip tentang perkawinan yang diatur oleh perundang-undangan; dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta memiliki keturunan dan untuk mentaati perintah Tuhan dan dijalankan berdasarkan cara yang dibenarkan oleh Tuhan serta bernilai ibadah. Namun beda halnya dalam KUH Perdata perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja antara seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa menyebutkan tujuan dan maksudnya.

Para sarjana Hukum turut memberikan definisi mengenai perkawinan atau pernikahan, diantaranya: Menurut Zahry Hamid nikah ialah akad (*ijab qabul*) dengan ucapan tertentu yang telah memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan oleh wali perempuan dan laki-laki yang akan menikahinya.⁷⁶ Menurut Sayuti Thalib nikah merupakan janji suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan

⁷⁶ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-undang Nikah di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978) h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga.⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat dan aturan-aturan untuk hidup bersama.

b. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menetapkan prinsip atau asas-asas perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁷⁸ Sebagaimana berikut;

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- 2) Sahnya perkawinan berdasarkan hukum Agama
- 3) Monogami, yaitu hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan.

Namun jika dikehendaki seorang suami dapat beristeri lebih dari satu dengan memenuhi berbagai persyaratan dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan

- 4) Pendewasaan usia perkawinan
- 5) Mempersukar perceraian
- 6) Kedudukan suami dan isteri seimbang, sehingga segala sesuatu mengenai keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Hak dan kedudukan isteri dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

- 7) Asas pencatatan perkawinan

⁷⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016)

h. 47

⁷⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) mengungkapkan; “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang merupakan syarat administratif.

3. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perjanjian menurut Hukum Islam

Istilah untuk perikatan (*verbintennis*) dalam hukum Islam kontemporer ialah *iltizām*. Istilah *iltizām* dipakai dalam hukum Islam klasik untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari satu pihak dan terkadang juga dipakai untuk perjanjian yang menyebabkan adanya perikatan, namun sekarang istilah *iltizām* sudah digunakan untuk menyebutkan perikatan secara keseluruhan. Syamsul Anwar menyebutkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari pada para pihak merupakan perikatan.⁷⁹ Selanjutnya istilah untuk perjanjian (*overenkomst*) dan kontrak (*contract*) dalam hukum Islam ialah akad. Akad berasal dari bahasa Arab *al-`aqd* yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan. Adanya ijab dan kabul sebagai pernyataan para pihak untuk melahirkan suatu akibat hukum dan objeknya, inilah yang dimaksud akad.⁸⁰ Misalnya dalam jual beli akad menjadi sebab berpindahnya barang dari penjual kepada pembeli, jika

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Akad dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 47-48

⁸⁰ *Ibid*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi akad dalam pemindahan hak milik maka ini disebut dengan hukum akad dan akad akan menimbulkan hak-hak akad.⁸¹

Kata perjanjian dalam hukum Islam berasal dari Bahasa Arab yaitu *mu'ahadah ittifa'* dan akad. Dalam al-Qur'an kata akad diartikan sebagai perikatan atau perjanjian, sehingga dapat disamakan istilah akad dengan *verbinten* (perikatan).⁸² Suatu hal yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu baik itu dari satu pihak maupun kedua belah pihak merupakan makna akad dalam istilah fiqih.⁸³ Akad itu pertalian ijab dan kabul, dilakukan oleh dua pihak dan tujuannya untuk menciptakan suatu akibat hukum⁸⁴ dan tentunya harus sesuai dengan kehendak syari'at, dianggap tidak sah suatu perikatan jika tidak sesuai dengan kehendak syari'at.

Agar dipandang sah menurut hukum Islam suatu perjanjian mesti memiliki beberapa unsur (rukun),⁸⁵

- 1) Ijab kabul (*shighāt* akad), ini merupakan pernyataan kalimat akad untuk mengikat diri yang bisa dilaksanakan dengan lisan atau tulisan. Ijab ialah pernyataan awal dari satu pihak dan kabul pernyataan dari pihak lainnya setelah ijab.
- 2) Subjek akad (*Al-`Aqidāin* atau *al-Muta`āqidain*), merupakan para pihak yang melangsungkan akad bisa terdiri dari dua orang ataupun

⁸¹ *Ibid*, h. 60

⁸² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) h. 22

⁸³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008) h.

⁸⁴ Syamsul Anwar, *Op.cit.* h. 70

⁸⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Op.cit.* h. 24-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih. Perjanjian harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian serta cakap hukum dan sehat akalnya agar perjanjian tersebut memiliki akibat hukum dan sah.

- 3) Objek akad (*Mahallul 'aqd* atau *al-Ma'qūd `alaih*), merupakan barang atau jasa yang akan diperjanjikan dan harus memenuhi 4 syarat menurut pakar hukum Islam, yaitu; harus konkret dan nyata, dibenarkan oleh *syara'* atau *nash*, diserahkan ketika terjadi perikatan dan harus jelas bagi kedua belah pihak yang mengadakannya.
- 4) Tujuan akad (*Maudhu' al-'aqd*), tujuan dibuatkan akad haruslah sesuai dengan tuntutan *syara'*, harus ada saat akad diadakan dan dapat berlangsung hingga berakhirnya akad.

Jika telah mencakup unsur-unsur di atas maka perjanjian atau perikatan dapat dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki kepastian hukum. Para pihak yang telah melakukan perjanjian hendaklah menghargai apa yang diperjanjikan dengan memenuhinya sebab dalam QS. Al-Maidah ayat 1 Allah Swt memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi akad. Akad disini merupakan janji setia kepada Allah Swt yang juga meliputi perjanjian terhadap sesama manusia.⁸⁶ Cakupan perjanjian pun sangat luas termasuk jual beli, hibah, wasiat, hutang-piutang, sewa-menyewa dan perjanjian dalam perkawinan.

⁸⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konsep Persyaratan dalam Akad Pernikahan

Dalam hukum Islam istilah perjanjian perkawinan tidak ditemukan akan tetapi lebih dikenal dengan persyaratan pernikahan atau syarat dalam pernikahan (*al-Syurūth fī an-nikāh*). Menurut terminologi ulama ushul, syarat adalah hal yang dibutuhkan oleh sesuatu dan bukan bagian dari esensi suatu tersebut. Sedangkan Al-Syaukani memaparkan bahwa syarat adalah sifat yang kuat lagi jelas dan apabila tidak ada menetapkan tidak adanya *masyrū`at* namun eksistensinya tidak menjamin ada atau tidaknya *masyrū`at*.⁸⁷ Syarat terbagi menjadi beberapa macam, ada *syarat syar`i* yaitu syarat yang menciptakan *masyrū`at* melalui hukum *syar`i* seperti *mahar* dan wali dalam akad nikah yang keberadaannya didahulukan daripada akad itu sendiri. Adapun *syarat ja`li* yaitu syarat sebagai suatu hal baru bagi akad serta mengikuti kehendak dari masing-masing pihak yang berakad.

Syarat dalam pernikahan yang dimaksud dalam pembahasan ini bukanlah syarat sebagai keabsahan nikah yang menyebabkan batalnya perkawinan jika tidak terpenuhi, akan tetapi syarat-syarat yang di ajukan antara suami-isteri untuk keberlangsungan nikah (*Luzhūm al-nikāh*)⁸⁸ dengan tujuan tertentu yang memiliki manfaat bagi keduanya. Adapun perbedaan syarat nikah dengan persyarat dalam pernikahan ialah:

⁸⁷ Ali Muhammad ‘Ali Qasim, *al-Tafriq Baina al-Zaujaini li ‘adami al-Wafa’i bi al-Syarhi*, (Iskandaria: Dār al-Jamāh al-Jadīdah, 2005) h. 10

⁸⁸ Syarat yang menjadi patokan berlangsungnya suatu pernikahan sehingga jika syarat itu tidak ada tidak mungkin pernikahan yang sudah berlangsung untuk dibatalkan. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Syarat nikah yang secara umum diketahui itu ditetapkan oleh syariat yaitu Allah Swt sedangkan persyaratan dalam nikah ditetapkan oleh pihak yang berakad.⁸⁹
- 2) Syarat nikah menetapkan sah atau tidaknya pernikahan sedangkan persyaratan dalam pernikahan sebagai keberlangsungan nikah dan jika tidak dipenuhi maka pernikahannya *fasakh*;
- 3) Tidak mungkin syarat nikah itu digugurkan namun persyaratan dalam pernikahan sewaktu-waktu bisa dicabut dan digugurkan.
- 4) Syarat nikah tidak terbagi pada *shahih* dan *fasid*, sedangkan persyaratan dalam pernikahan terbagi pada syarat yang *shahih* dan yang *fasid*.⁹⁰

Akad nikah dikaitkan dengan syarat yang memiliki ketentuan masing-masing, ada syarat yang manfaatnya kembali pada suami atau isteri saja, ada yang bermanfaat bagi keduanya, ada syarat yang sesuai dengan tujuan akad, ada yang bertentangan dengan tujuan akad, dan ada syarat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Manfaat yang akan dituju dari dibuatnya perjanjian perkawinan ialah untuk kemaslahatan masing-masing pihak dalam membangun rumah tangga dan dapat memelihara lima unsur pokok manusia dalam membentuk keluarga sakinah.⁹¹

⁸⁹ Muhammad Ibn Shālih Al-Utsaimīn, *al-Syarh al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni*, Vol. 12, Beirut: Dār Ibn al-Jauzi, 1427 H) h. 162

⁹⁰ Muhammad Ibn Shalih al-'Utsaimīn, *Op.cit*, h. 163

⁹¹ Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqāshid al-Shari'ah*,. h. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wahbah az-Zuhailī, syarat dalam pernikahan ialah salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan sesuatu pada pihak lain dengan tujuan tertentu. Ijab qabul akan terjadi jika dibarengi dengan syarat-syarat karena antara keduanya saling berkaitan.⁹² Namun menurut jumhur ulama akad yang dibarengi oleh syarat tidak sah, akad perkawinan dengan syarat atau perjanjian perkawinan itu terpisah dan tidak ada kaitan hukum antara keduanya. Dengan demikian persyaratan dalam pernikahan yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tidak membatalkan akad nikah yang telah sah, namun pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan pembatalan pernikahan.

Persyaratan dalam pernikahan dengan perjanjian perkawinan memiliki keterkaitan, karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Beda halnya dengan sumpah, sebuah perjanjian bukanlah suatu sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan *wallahi, billahi, tallahi* dan jika tidak dipenuhi akan berdosa.⁹³ Membuat perjanjian atau syarat dalam pernikahan bukanlah suatu hal yang mutlak dan harus, akan tetapi hanya sebagai alternatif bagi yang menghendakinya karena dalam hukum Islam hal yang tidak berkaitan dengan ibadah hukumnya *mubah* (boleh) dan diberikan kebebasan dalam membuat dan melaksanakan kontrak atau perjanjian termasuklah membuat perjanjian perkawinan

⁹² Wahbah az-Zuhailī, *Op.cit*, h. 53

⁹³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi suami-dan isteri, seperti kaidah fiqih yang dikemukakan mazhab asy-Syafi'i yaitu;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁹⁴

Perjanjian perkawinan yang dibuat dan telah disepakati oleh suami isteri selama tidak ada pihak lain yang memaksa maka keduanya wajib untuk memenuhi perjanjian tersebut,⁹⁵ sesuai dengan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu ...”(QS. Al-Ma'idah (5): 1)⁹⁶

Ibnu Mas'ud Ra berkata; jika kamu mendengar panggilan Rabb-mu dengan *yā ayyuhaladzīna āmanu*, maka bersiaplah karena sesungguhnya ada kebaikan yang diperintahkan atau keburukannya yang dia larang. Seruan semacam ini dimaksudkan untuk mempersiapkan diri melaksanakan ajakan yang terkandung dalamnya.

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra' (17): 34)⁹⁷

⁹⁴ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, al-Qawā'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996) h. 25

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Op.ci*, h. 132

⁹⁶ Kementrian Agama RI, *Op.cit*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Swt memerintahkan dalam ayat di atas untuk menepati janji, karena akan dimintai pertanggung jawaban terhadap janji yang dibuat, dan juga jangan mengkhianati orang yang diberi perjanjian dengan melanggarnya.⁹⁸ Rasulullah Saw juga telah menegaskan dalam sabdanya untuk memenuhi janji yang telah dibuat;

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرْطِ أَنْ تَوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه البخاري في صحيحه)⁹⁹

“Syarat yang paling utama dipenuhi ialah syarat-syarat untuk menghalalkan hubungan suami-isteri. (HR. Bukhāri dalam Kitab Shahihnya)”

Dalil di atas memberikan sisi terang bahwa perjanjian perkawinan bukanlah hal sepele dalam perkawinan, akan tetapi memiliki peranan penting untuk keberlangsungan pernikahan yang harmonis. Untuk itu memenuhinya adalah suatu keharusan.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab persyaratan dalam pernikahan ini telah ada. Ini menunjukkan bahwa membuat perjanjian atau syarat dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang baru diperbincangkan tetapi memang sudah dikenal dalam Islam. Pada masa Khalifah Umar ini terjadi pelanggaran dalam perjanjian dan mereka

⁹⁷ Ibid, h. 285

⁹⁸ Abū Ja'far Muhammad bin Jarin ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 16, (Jakarta: Istaka Azzam, 2009) h. 671

⁹⁹ Imam Bukhari, *Loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadukan secara langsung perkara ini kepada Khalifah Umar untuk diputuskan.¹⁰⁰ Detail kasusnya ialah;

“Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan mensyaratkan (janjian) untuk tetap tinggal dirumahnya. Kemudian laki-laki itu akan membawanya pindah karena itu mereka mengadukannya kepada khalifah ‘Umar bin Khattab. Khalifah menyatakan bahwa wanita itu mempunyai hak agar dipenuhi syaratnya. Maka berkata laki-laki tersebut, kalau begitu, mereka (para isteri) akan menceraikan kami (para suami). Maka berkata Umar: Yang menjadi pemutus dalam hak-hak (manusia) adalah syarat-syarat (yang mereka sepakati)”.

Khalifah Umar bin Khattab menjadi mediator dalam kasus suami isteri tentang wajibnya memenuhi syarat. Bagi sahabat lain kewajiban ini tidak diingkari, dan selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan nikah memenuhinya adalah wajib.¹⁰¹

Rasulullah Saw juga telah menyebutkan dalam haditsnya;

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِ ... (رواه البخاري في صحيحه)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (janji-janji) yang mereka buat (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ-nya)”

Syarat dalam pernikahan yang shahih dan sesuai dengan syara’ wajib dipenuhi oleh suami. Kewajiban ini sesuai dengan syari’at, akal sehat, dan *qiyas* yang benar. Karena seorang wanita tidak rela dirinya disetubuhi kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Jika syarat yang diajukan tidak wajib dilaksanakan maka akad nikahnya terjadi tidak atas dasar suka sama suka, maksudnya wanita melakukan sesuatu yang

¹⁰⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakkhās Fiqhi*, Jilid 3, Cet. 1. Terj. Sufyan bin Had Baswedan, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013) h. 52

¹⁰¹ Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Op.cit.* h. 485

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak harus dilakukan bahkan Allah Swt dan Rasul-Nya pun tak memerintahkan,¹⁰² ini perkataan dari al-'Allamah Ibnu al-Qayyim tentang perkara yang ditangani oleh Khalifah Umar bin Khattab. Syarat dalam pernikahan yang menguntungkan pihak isteri itu boleh untuk di ajukan dan suami berkewajiban untuk memenuhinya jika tidak maka isteri mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan, pendapat ini berdasarkan keputusan Khalifah Umar bin Khattab di atas.

4. Perjanjian Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

Secara bahasa kata perjanjian berasal dari kata janji dengan tambahan per-an pada awal dan akhirnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) beragam makna janji tersebut, diantaranya; ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak menolong, bertemu, memberi dan lainnya), persetujuan antara dua pihak yang mana mereka bersedia dan sanggup untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu, janji juga merupakan syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi.¹⁰³ Adapun yang dimaksud dengan perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang mana masing-masing sepakat untuk memenuhi dan mentaati apa yang diperjanjikan.¹⁰⁴ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.

¹⁰² Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Op.cit*, h. 53

¹⁰³ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/janji.html> diakses pada tanggal 22

September 2020, pukul 10.34 Wib

¹⁰⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat perjanjian dilangsungkan antara dua pihak atau lebih maka menyebabkan adanya perikatan diantara mereka. Hal ini dikarenakan ada keterkaitan atau hubungan sebab akibat antara perjanjian dan perikatan, dimana perjanjian menjadi sebab adanya sebuah perikatan.¹⁰⁵ Namun pada intinya perjanjian itu mengenai perkataan dengan melibatkan dua pihak yang terkandung di dalamnya unsur janji, sedangkan perikatan ialah hubungan orang yang saling berjanji tersebut.

Pengertian perjanjian secara istilah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya; perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau lebih untuk melaksanakan suatu hal, ini pendapat dari R. Subekti. Menurut Djumadi, perjanjian merupakan dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁰⁶ Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap, perjanjian ialah hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak memiliki hak untuk memperoleh prestasi dan pihak lain memiliki kewajiban melaksanakan prestasi.¹⁰⁷ Hilman Hadikusuma mengemukakan yang dimaksud dengan perjanjian ialah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menaati apa yang diperjanjikan dan mereka saling berjanji untuk itu.¹⁰⁸ Wirjono Projodikoro memandang perjanjian itu sebagai suatu perbuatan hukum tentang harta kekayaan yang mana satu pihak berjanji

¹⁰⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1978) h. 1

¹⁰⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 2

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2, (Bandung: Alumni, 1986)

¹⁰⁸ H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005) h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tidak atau melakukan sesuatu dan pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰⁹ Menurut Gunawan Widjaja perjanjian melahirkan perikatan yang mana salah satu pihak akan memiliki kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban yang dibebankan pada debitor memberikan hak pada kreditor untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian.¹¹⁰

Perikatan yang bersumber dari perjanjian akan menciptakan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak untuk menuntut prestasi. karena perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu,¹¹¹ dan perjanjian juga merupakan penyesuaian kehendak para pihak yang menghasilkan hubungan perikatan.

Dalam KUH Perdata (BW) pasal 1313 dipaparkan pengertian perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Makna tersirat dalam pasal ini bahwa perjanjian dapat dilakukan secara sepihak, hal ini kembali dijelaskan pada pasal 1314 bahwa perjanjian dapat dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Perjanjian dengan cuma-cuma yang mana satu pihak memberi keuntungan pada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri, contohnya jika satu pihak memberi hadiah kepada pihak lain dan keduanya menyetujui maka ini telah termasuk kepada perjanjian yang

¹⁰⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1985) h. 11

¹¹⁰ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 91

¹¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian I*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1995) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengikat. Adapun perjanjian atas beban ialah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹¹²

Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, hubungan hukum disebut juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta dilakukan secara sengaja. Seperti yang dijelaskan dalam KUH Perdata perjanjian cuma-cuma itu dimaksudkan juga sebagai perbuatan hukum sepihak, karena menimbulkan hak dan kewajiban serta dilakukan oleh satu pihak saja seperti memberi hadiah dan membuat surat wasiat. Adapun perjanjian atas beban dimaksudkan juga sebagai perbuatan hukum dua pihak, karena dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hubungan timbal balik antara keduanya seperti persetujuan jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang dan lain sebagainya.¹¹³

Dapat disimpulkan dari pengertian yang dikemukakan di atas, bahwa perjanjian itu terjadi atas kesadaran dan kehendak dua orang atau lebih untuk berjanji mengenai sesuatu hal yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya dan dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan, perjanjian dalam bentuk tertulis akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Jika melihat dari beberapa pengertian di atas, secara umum perjanjian memiliki ciri-ciri,¹¹⁴ diantaranya:

¹¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

¹¹³ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 2-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 2

¹¹⁴ *Ibid*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak atau lebih. Oleh karenanya kehendak sepihak tidak bisa menimbulkan perjanjian, sedikitnya perjanjian itu dilakukan oleh dua orang yang mana mereka saling setuju satu dan yang lain.

2) Apa yang ditentukan dalam perjanjian maka hal itu pula yang akan menimbulkan hak-hak bagi para pihak, karena perjanjian merupakan suatu sistem terbuka

Perjanjian itu dibagi atas tiga macam berdasarkan hal yang dijanjikan (prestasi), yakni: Perjanjian untuk menyerahkan barang, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Selanjutnya perjanjian untuk berbuat sesuatu, seperti perjanjian untuk mendesain baju pernikahan. Yang terakhir perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, seperti tidak membuat usaha yang sama dengan milik orang lain.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia ada 3 produk yang mengatur perjanjian perkawinan, yaitu; Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 139-154, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 namun pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian dan apa saja isi dari perjanjian perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perjanjian perkawinan secara umum dibuat karena salah satu pihak memiliki sejumlah harta yang lebih besar dari pihak lainnya, suami dan isteri membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar, untuk melindungi masing-masing usaha agar jika salah satu pihak bangkrut pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain tidak tersangkut dan masing-masing pihak bertanggung gugat atas hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin.

Definisi Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul “Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Guna memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud maka perlu diperjelas beberapa kosakata yang dianggap penting, yaitu;

1. Perjanjian Perkawinan

Merupakan persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri untuk mengatur akibat perkawinan dan mereka sepakat untuk memenuhi apa yang diperjanjikan.

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pembicaraan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan berlangsung hingga tahap IV sebelum disetujui oleh DPR. Pada tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan tersebut disahkan oleh Presiden Soeharto menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 14 bab yang dibagi dalam 67 pasal, memuat kaidah hukum tentang perkawinan secara pokok dalam garis besar (perkawinan, perceraian dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rujuk) yang pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya.¹¹⁵

3. Ditinjau

Melihat sesuatu yang jauh dari ketinggian, hasil meninjau, pandangan, pendapat setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.

4. Hukum Islam

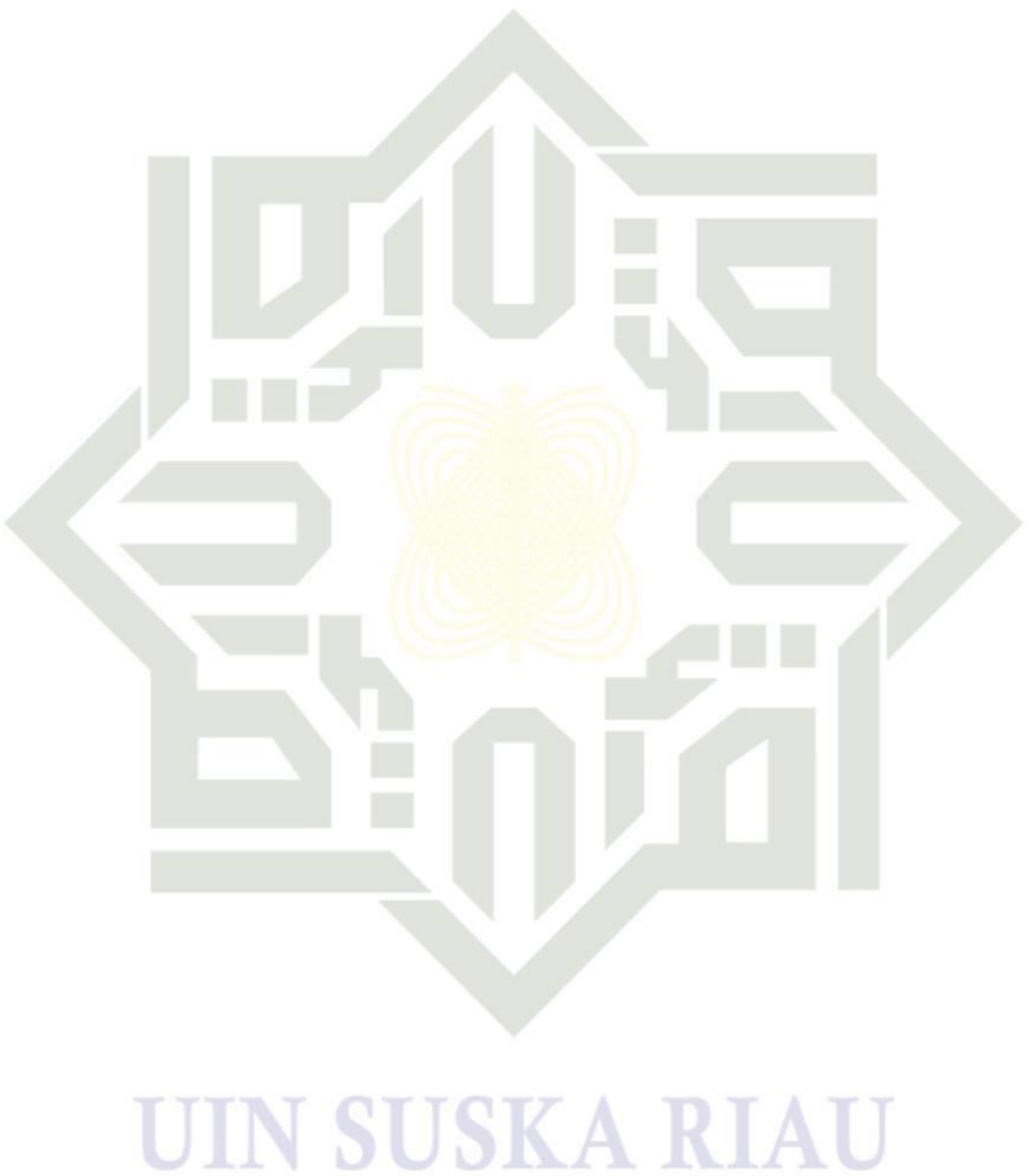
Merupakan aturan atau ketentuan tentang tingkah laku *mukallaf* dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluknya yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. Hasbi ash-Shiddieqy memberikan penjelasan bahwa hukum Islam bagian dari ilmu fiqih, karena luasnya pembahasan ilmu fiqih yang mengumpulkan berbagai jenis hukum Islam untuk mengatur keperluan seseorang dan masyarakat.¹¹⁶ Kaidah yang digunakan dalam hukum Islam sebagai tolak ukur perbuatan manusia di bidang ibadah ataupun muamalah dikenal dengan sebutan *al-ahkām al-khamsah* (penggolongan hukum yang lima) yaitu; wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.¹¹⁷ Menurut istilah ahli ushul hukum *syar'i* ialah titah Allah tentang perbuatan *mukallaf* baik berupa tuntutan, memilih, atau ketentuan (*Wad'i*). Sedangkan menurut ahli fiqih hukum *syar'i* merupakan hasil yang Allah kehendaki seperti wajib, haram dan boleh. Intisarinya hukum Islam ialah syariat dari Allah Swt yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw

¹¹⁵ Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jurnal al-Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Family Law) Vol. 21 No. 02 Desember 2012, h. 17-20

¹¹⁶ Supardin, *Materi Hukum Islam*, Cet. I (Makassar: Alauddin University Press, 2011) h.

¹¹⁷ Teungku Hasbi Ash-Shiddiqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Riki Putra, 2000) h. 2

mengenai kepercayaan (*aqidah*) maupun perbuatan (*amaliyah*) hamba-Nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian atau *research* berasal dari bahasa Inggris yaitu *re* berarti kembali dan *search* berarti mencari,¹¹⁸ jadi *research* merupakan kegiatan untuk mencari kembali, atau suatu upaya pencarian kebenaran dan ketepatan dari suatu pengetahuan.¹¹⁹ Adapun penelitian hukum menurut pakar hukum adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum yang layak diterapkan secara *in concreto*¹²⁰ untuk menyelesaikan kasus tertentu.¹²¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum merupakan langkah untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum dan doktrin hukum yang bertujuan menjawab isu hukum tertentu.¹²² Jenis penelitian secara umum dikelompokkan berdasarkan pendekatan, tempat, bidang ilmu yang diteliti, hasil dan tujuan penelitian.¹²³

Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya yaitu suatu konsep yang direncanakan dan prosedur penelitian yang termuat di dalamnya langkah-langkah untuk meneliti, mulai dari penjabaran dan asumsi luas hingga penjabaran terperinci dalam mengumpulkan data dan menganalisa, dibedakan menjadi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif;

¹¹⁸ Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (London: Free Press, 1987) h. 4

¹¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1

¹²⁰ *In concreto* adalah aturan hukum yang secara konkrit berlaku di suatu Negara dan Pengadilan juga telah menerapkan aturan tersebut terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

¹²¹ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 105-106

¹²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) h. 35

¹²³ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) h. 9-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci yang berlandaskan pada *filsafat positivisme* untuk meneliti kondisi objek alamiah dan sampel sumber data dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*.¹²⁴ Sesuatu yang menjadi objek penelitian kualitatif dilihat berdasarkan konteks natural atau apadanya tanpa perubahan, penambahan bahkan pengurangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti telah lebih dahulu meneliti sebelum berada di lapangan dengan studi pendahuluan yang dilakukan bisa menjadi fokus penelitiannya. Suatu kebenaran merupakan hal yang dinamis bagi peneliti kualitatif karena dapat ditemukan hanya melalui penelaah terhadap orang-orang dan interaksi sosial mereka.¹²⁵ Arah yang dikehendaki oleh penelitian kualitatif ialah bimbingan penyusunan teori yang *substantive* dari data, dikarenakan beberapa hal; kenyataan ganda yang mungkin dihadapi tidak tercukupi oleh apriori, apa yang dilihat maka itulah yang akan dipercaya dalam penelitian ini sehingga berusaha untuk netral, dan teori dasar lebih responsive terhadap nilai konseptual.¹²⁶

Dalam menjalankan prosedur penelitian kualitatif, kemungkinan apa yang direncanakan terjadi perubahan karena tidak adanya kesesuaian perencanaan dengan apa yang ditemukan di lapangan. Prosedur utama penelitian ini dengan mendeskripsikan apa yang dilihat, dirasakan dan

¹²⁴ Sanapia Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang, YA3, 2002), h. 22

¹²⁵ Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 22

¹²⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didengar, kemudian data-data yang telah diperoleh akan dipilah, digolongkan, disederhanakan dan membuang data yang tidak terkait, hal ini bertujuan untuk memfokuskan masalah penelitian. Fokus masalah yang telah ditetapkan, akan diuraikan lebih rinci dan dilakukan analisis secara mendalam yang akan memperoleh pengetahuan atau hipotesis.¹²⁷

Penelitian kualitatif ini analisis datanya bermula dari teori menuju data yang dikumpulkan dari buku dan jurnal berdasarkan topik penelitian, kemudian mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan jenis pendekatannya dan disesuaikan dengan ide atau judul penelitian yang akan dibahas dan berakhir dengan penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan dan penelitiannya menghasilkan data deskriptif.

2. Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif mengupayakan untuk meneliti sesuatu yang didasari dengan filsafat positivisme (*logical positivism*) terhadap aturan-aturan yang ketat mengenai logika, hukum-hukum dan kebenaran, data yang dihasilkan berupa angka-angka (*numerical*).¹²⁸ Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, menguji variabel, menentukan hubungan sebab-akibat, menguji teori dan meramalkan suatu gejala. Dalam mengalisis data nya digunakan teknik statistik, sehingga diperoleh hasil atau temuan penelitian yang akurat dan dapat diberlakukan secara umum.

Prosedur penelitian kuantitatif dimulai dengan menentukan permasalahan yang ingin diketahui, menetapkan tujuan penelitian,

¹²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

¹²⁸ Danim Sudarwan, *Op.cit*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang telah ada dibagi menjadi sub-sub agar mudah dikelola, mengajukan hipotesis, mencari data berdasarkan hipotesis, lalu mengkonfirmasi apakah permasalahan yang diajukan diterima atau ditolak oleh hipotesis.¹²⁹

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif karena data-data yang dipakai berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan dan berbentuk kata-kata atau verbal. Karakteristik pokok penelitian kualitatif yaitu sumber data yang diperoleh dari lingkungan alamiah dengan kajian utamanya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial. Dalam meneliti perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peneliti mengkaji dan menelaah ayat demi ayat dalam pasal tersebut kemudian dikaitkan bagaimana penerapan pasal tersebut dalam masyarakat berdasarkan kacamata hukum Islam.

Klarifikasi penelitian berdasarkan tempat dilakukan penelitian diantaranya;

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan berasal dari lokasi atau lapangan penelitian, tujuannya untuk mengetahui dan mempelajari secara jelas peristiwa, keadaan sosial di lingkungan tertentu baik individu, kelompok ataupun masyarakat.¹³⁰

¹²⁹ Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, *Pendekatan, Jenis dan Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta, t.t, 2008) h. 23

¹³⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian bercorak kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah literatur-literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian.¹³¹ Penelitian kepustakaan menggunakan buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu sebagai bahan penelitiannya. Hal utama dalam prosedur penelitian pustaka ialah memilih topik, lalu eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, membaca sumber data, membuat catatan penelitian, mengolah catatan penelitian, dan penyusunan laporan

3. Penelitian Laboratorium (*Laboratory Research*)

Penelitian yang bersifat percobaan atau eksperimen dan dilakukan dalam keadaan tidak alamiah atau di tempat tertentu (lab). Kelompok peneliti dijauhkan dari hal-hal yang memungkinkan mengganggu hasil pengujian.

Berdasarkan bidang ilmu yang diteliti, jenis penelitian terdiri dari dua macam, yakni;

1. Penelitian Sosial

Penelitian sosial secara khusus digunakan untuk menambah pengetahuan sosial, gejala sosial, dan praktik sosial. secara umum mengkaji ilmu dalam bidang sosial seperti pendidikan, hukum, ekonomi, sosiologi, politik, demografi dan lain sebagainya. Objek yang diteliti akan

¹³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005) h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diungkapkan kebenarannya dengan penelitian sosial hingga akan tercipta ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.¹³²

2. Penelitian Eksakta

Penelitian ini secara khusus meneliti keilmuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam, seperti kimia, fisika, biologi, pertanian, astronomi, kedokteran dan sebagainya.¹³³

Dilihat dari hasil yang diperoleh, jenis penelitian terbagi dalam 2 aspek, yaitu;

1. Penelitian Dasar (*Basic Research*)

Penelitian dasar bersifat intelektual karena bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengujian teori-teori yang mendasari penelitian yang disebut juga dengan penelitian murni (*pure research*). Hasil penelitiannya dapat menjadi dasar dalam memecahkan masalah praktis.¹³⁴

2. Penelitian Terapan (*Applied Research*)

Tujuan dilakukan penelitian terapan tak hanya untuk pengetahuan saja, namun juga untuk pemecahan masalah yang memiliki manfaat bagi kepentingan individu, kelompok, keperluan industri maupun politik. Demikianlah disebut penelitian terapan karena hasil penelitiannya bisa langsung diterapkan. Penelitian ini bersifat praktis karena difokuskan pada

¹³² [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_sosial), di akses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 20.33 WIB

¹³³ <http://iimabusyifa.blogspot.com/2013/08/pengantar-metodologi-penelitian.html>, di akses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 20.36 WIB

¹³⁴ Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, *Op.cit*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan praktis pada bidang tertentu bukan pengetahuan yang bersifat universal.¹³⁵

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa jenis penelitian hukum dapat terbagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹³⁶ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang menjadi panduan perilaku setiap individu dan dijadikan masyarakat sebagai norma atau kaidah. Cakupannya sangat luas dengan mengumpulkan data primer sebagai penguat data sekunder dan biasanya dalam penelitian ini disertai rekomendasi atau melengkapi norma yang diteliti agar lebih baik (metode *preskriptif*). Terdapat 5 cakupan dalam penelitian hukum normatif yaitu; penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif bersumber dari perpustakaan, karena hanya ditujukan pada peraturan tertulis yang sangat terkait dengan perpustakaan.

Adapun penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) mengkaji tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, implementasi aturan hukum, peranan lembaga hukum, pengaruh masalah sosial terhadap hukum dan sebaliknya.¹³⁷ Cakupan dalam penelitian hukum empiris mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektifitas hukum. Penelitian hukum

¹³⁵ *Ibid*, h. 16

¹³⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 1

¹³⁷ Salim Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empiris disebut juga sebagai penelitian sosiologis yang meneliti data-data primer.¹³⁸

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif digolongkan menjadi 5 macam oleh Peter Mahmud Marzuki¹³⁹, yaitu;

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan sejarah (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dalam penelitian Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam, digunakan jenis penelitian yang bersifat *yuridis normative* untuk mengkaji berbagai sumber data hukum tertulis serta bahan pustaka berupa perundang-undangan yang ada.¹⁴⁰ Penelitian ini mengacu pada pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu metode pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek dengan cara menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang dibahas, dan pendekatan hukum (*syar'i*) dengan menjelaskan sesuai norma atau kaedah yang ada yaitu yang berhubungan dengan hukum Islam.

Sumber Data

Sumber penelitian merupakan komponen penting dalam penelitian untuk mengetahui dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data utama dalam

¹³⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, h. 14

¹³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h.93

¹⁴⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.cit*, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum normatif ialah yang berasal dari kepustakaan atau literatur terkait dan hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data disebut juga dengan bahan hukum dengan tujuan menganalisa hukum yang berlaku, terdiri atas bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan bahan orisinil yang menjadi dasar atau sumber utama dalam penelitian.¹⁴² Peter Mahmud Marzuki berkomentar bahwa bahan hukum primer memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹⁴³ Yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, seperti Kitab *al-Umm*, Kitab *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati al-Fāzi al-Minhāj*, Kitab *al-Mughnī*, Kitab *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Kitab *Majmū'atu al-Fatāwa*, Buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi), Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁴¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Loc.cit*

¹⁴² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) h. 117

¹⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun bahan hukum sekunder bersifat semu, meliputi kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan.¹⁴⁴

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai artikel atau jurnal ilmiah, tesis dan disertasi yang terkait dengan perjanjian perkawinan.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Contoh sumber hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.¹⁴⁵ Data tersier dalam penelitian ini termasuk buku-buku yang berkaitan dengan hukum keluarga dan peradilan seperti buku Hukum Perkawinan di Indonesia, Fiqih Munakahat, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya, kamus dan ensiklopedia hukum Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian, pengumpulan data yang diperlukan berguna untuk memperkuat

¹⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*

¹⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Menurut Bambang Waluyo, jenis alat pengumpulan data terdiri dari beberapa macam¹⁴⁶, yaitu;

1. Studi Dokumen/Studi Kepustakaan;

Pengumpulan data dengan cara studi dokumen ialah mengumpulkan bahan-bahan seperti buku, jurnal, data penduduk, grafik, data statistik, biografi, karya seni, gambar, surat dan lain-lain yang sesuai dengan fokus pembahasan. Sugiyono menyebutkan dalam penelitian kualitatif studi dokumen ini sebagai penyempurna dari metode observasi dan metode wawancara.¹⁴⁷

Studi kepustakaan mengemukakan teori-teori yang sejalan dengan penelitian dengan tujuan sebagai rujukan dalam membahas hasil penelitiannya.

2. Wawancara (*Interview*);

Lexy J. Moloeng mendefinisikan wawancara ialah suatu percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawabannya, percakapan tersebut memiliki tujuan tertentu.¹⁴⁸ Menurut Esterberg wawancara adalah dua orang yang bertemu untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga diperoleh kesimpulan dari topik tersebut.¹⁴⁹ Jadi dalam suatu penelitian, peneliti menggali informasi kepada *interviewee* dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pembahasan.

¹⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h.

¹⁴⁷ Sugiyono, *Op.cit*, h. 82

¹⁴⁸ Lexy J. Moloeng, *Op.cit*, h. 186

¹⁴⁹ Sugiyono, *Op.cit*, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada 7 langkah dalam pengumpulan data melalui wawancara, yaitu; menetapkan orang yang akan di wawancara, menyiapkan bahan pembicaraan, mengawali wawancara dengan pembukaan, melangsungkan wawancara, menyimpulkan hasil wawancara, menuliskan hasil wawancara lalu menindak lanjuti hasil wawancara.¹⁵⁰

3. Daftar Pertanyaan (*Quisioner*)

4. Pengamatan (*Observasi*).

Pengamatan atau observasi tersusun dari proses biologis dan psikologis dalam pengumpulan datanya.¹⁵¹ Peneliti akan memperoleh fakta-fakta yang terdapat di suatu lingkungan tempat dilakukan penelitian, melihat dengan mata kepala sendiri, mendengarkan dengan telinga sendiri, mencatat apa yang dilihat, di dengar dan di rasakan. Observasi dapat dilakukan dengan observasi langsung, observasi partisipatif dengan menggunakan alat perekam dan catatan kecil untuk mencatat hal penting saat pengamatan, dan observasi tidak langsung.

Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data hanya bisa dilakukan dengan studi dokumen/studi kepustakaan, namun dapat digunakan secara bersamaan keempat alat pengumpulan data tersebut pada penelitian lainnya. Untuk itu diperlukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis berupa buku, literatur serta dokumen yang didalamnya memuat mengenai pembahasan penelitian yaitu karya tentang perkawinan, perjanjian perkawinan, dan berbagai literatur hukum

¹⁵⁰ *Ibid*, h. 76

¹⁵¹ *Ibid*, h. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata Islam maupun positif. Penelitian ini juga menggunakan data dari penelusuran *website/situs* jurnal-jurnal yang terkait dengan pembahasan.

D Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang ada menjadi hasil penelitian, sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Sugiyono mengungkapkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, studi dokumen dan observasi harus disusun secara sistematis berdasarkan kategori, melakukan sintesa, menyusun serta memilih data yang dianggap penting lalu membuat kesimpulannya.¹⁵² Data primer dan sekunder yang telah terkumpul dalam penelitian hukum normatif ini kemudian di analisa untuk menemukan jawaban dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ialah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berupa bahan-bahan pustaka yang akan disajikan secara sederhana sistematis dan bahan-bahan hukum berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan terkait, prinsip hukum, doktrin, pendapat pakar hukum ataupun pendapat peneliti.¹⁵³

Dalam penulisan penelitian ini, data dan pemaparan terkait “Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Hukum Islam” yang telah didapat terlebih dahulu penulis paparkan dan jelaskan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Selanjutnya akan penulis

¹⁵² Sugiyono, *Op.cit*, h. 89

¹⁵³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017) h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisa setiap ayat dalam Pasal 29 tersebut berdasarkan pendekatan hukum (*syar'i*) dengan menjelaskan sesuai norma atau kaedah yang ada yaitu yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti menurut *fiqih*, ulama mazhab dan kaidah-kaidah fiqih sehingga akan menghasilkan kesimpulan tentang perjanjian perkawinan pada Pasal 29 dilihat dari kacamata hukum Islam. Penulis juga menggunakan metode deduktif,¹⁵⁴ yaitu dengan menguraikan pembahasan secara umum kemudian menarik kesimpulannya. Dan metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait, kemudian memilah berdasarkan kelompok pembahasan dan yang terakhir menyimpulkan.

¹⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998) h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bagian akhir pembahasan penelitian Tesis ini, intisari yang dapat diambil berdasarkan analisis dan disesuaikan dengan tujuan penulisan Tesis yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam” yaitu :

1. Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat 4 ayat, yaitu; perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dan ketika akad nikah berlangsung, dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan asalkan isinya tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan, mulai berlaku perjanjian antara suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan serta dapat dilakukan perubahan terhadap isinya atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada tahun 2015 ayat (1), (3) dan (4) diperluas maknanya oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 69/PUU-XII/2015. Bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, ketika dan setelah perkawinan, bisa berlaku kapanpun sesuai dengan ketetapan para pihak, serta dapat dicabut dan diubah dengan kesepakatan bersama.
2. Dalam hukum Islam, waktu membuat perjanjian perkawinan hanyalah sebelum dan ketika prosesi akad nikah. Isi perjanjian harus jelas dan memiliki batasan yaitu tidak bertentangan dengan batas hukum yang mana harus tunduk pada ketentuan Buku 1 KUH Perdata Pasal 139-143. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar batas agama seperti perjanjian untuk menyakiti isteri, bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan. Ulama fiqih mengklarifikasi bentuk syarat dalam pernikahan, bahwa syarat yang *shahih*, memiliki manfaat dan sesuai dengan akad pernikahan maka itu harus dipenuhi. Adapun syarat yang *fasid* dan bertentangan dengan tujuan pernikahan maka tidak harus dipenuhi. Perjanjian perkawinan juga tidak boleh melanggar batas kesusilaan, melanggar norma dan adat yang berlaku di tengah masyarakat. Secara umum isi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *syirkah*. Perjanjian persatuan harta atau pisah harta memberikan kemaslahatan untuk menjaga harta suami dan isteri. Isi perjanjian lain dapat berupa tidak melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukan poligami. Perjanjian yang telah dibuat bisa diroboh bahkan dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam hukum Islam pencabutan perjanjian perkawinan itu dilarang karena seperti orang yang memberi hibah lalu menarik kembali hibahnya, Rasulullah Saw melaknat orang seperti ini. Perjanjian yang dibuat akan mengikat suami, isteri dan pihak ketiga yang berkepentingan, maka apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian perkawinan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Menurut Ibnu Qudamah, pelanggaran ini berakibat *fasakh* (batal) nya perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran dan Rekomendasi

1. Kepada pemerintah atau khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah agar mengadakan sosialisasi tentang nilai-nilai positif membuat perjanjian perkawinan kepada para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan terkait eksistensi, tujuan dan manfaat diadakannya perjanjian perkawinan, yaitu sebagai perlindungan hak dan memberikan kesadaran bagi masing-masing pihak akan hak dan kewajibannya serta melindungi dari kesewenangan dalam rumah tangga. Pemerintah juga hendaknya memberi pengetahuan tentang isi perjanjian yang dibenarkan dalam hukum Islam dan Perundang-undangan, serta mendaftarkan perjanjian tersebut melalui KUA dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kepada tokoh masyarakat/ *'alim 'ulama* untuk memberikan pengertian terhadap masyarakat agar mengubah cara pandang dalam menanggapi perjanjian perkawinan dan tidak memandang perjanjian perkawinan dari sisi negatif akan tetapi mempertimbangkan sisi *utilities* (kemanfaatan) berdasarkan *maqashid syari'ah*. Yang mana sebagai tindakan preventif apabila dikemudian hari timbul perselisihan penyebab perceraian.
3. Bagi civitas akademika, hendaknya mengkaji tentang perjanjian perkawinan atau persyaratan dalam pernikahan untuk memperkaya *khazanah* pemikiran dan keilmuan hukum Islam khususnya hukum perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, Jilid 1. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Ali, Hasan M. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media
- Ali, Mohammad Daud. 2011. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ali Nihyān, Zāyd bin Sulthān. 2013. *Ma'lumatu Zāyd li al-Qawāidh al-Fiqhiyyah wa al-Ushūliyyah*, Jilid 23, Cetakan Pertama. Abu Dabi: Daulah 'Imārāt al-Arabiyah al-Mutahadah
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tetang Akad dalam Fiqih Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andasasmita, Komar. 1990. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar
- Anshori, Abdul Ghafur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Anshary, H. M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Bukhari, Imam. T.th. *Shahīh Bukhari* Juz III. Beirut: Dār al-Fikri
- Budiono, Herlien. 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet., Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka
- Damanhuri, H A. 2007. *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Halil, A. Basiq. 2006. *Tebaran Pemikiran Keislaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Shubuh*. t.t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Doi, Abdul Rahman I. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Erliyani, Rahmida dan Fatma Surah. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta, K-Media
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan. 2013. *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 3*, Cet. 1. Terj. Sufyan bin Fuad Baswedan. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang, YA3
- Ghazaly, Abd Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana
- Ghazali, Imam. T.th. *Ihya Ulumuddin*, Juz 2. Semarang: Usaha Keluarga
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. 2003. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti
- Al-Hajjāwī, Asy-Syaikh Syarfuddīn Abī an-Najā Mūsa bin Ahmad. T.th. *Zādu al-Mustaqni` Fī Ikhtishār al-Muqni`*. Madāru al-Wathān Linnasyir
- Hadikusuma, H. Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Hamid, Andi Tahir. 1996. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-undang Nikah di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta
- Halim, M. Niphan Abdul. 2008. *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2. Bandung: Alumni
- Hartanto J, Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Ibn Qudamah, Abi Muahammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. 1997. *Al-Mughni*, Juz IX. Riyadh: Darul A’lam al-Kutub
- Ibnu Taimiyah al-Harrāniyy, Syaikh al-Islām Taqiyyuddīn Ahmad. 1988. *Majmū’atu al-Fatāwa*, Juz 32. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah
- Ibn al-Munji, Zainudīn al-Munji bin ‘Utsmān bin As`ad. 2003. *Al-Mumti` fī Syarh al-Muqni`*, Juz 3. Makkah Mukarramah: Maktabah al-Asadī
- Ibn Rusyd, Imam al-Qadhy Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. 1994. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Juz II, Cet. Ke-3. Kairo: Maktabah al-Khojani
- Isnaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Revka Petra Media: Surabaya
- T. Jafizham. 1997. *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: CV. Percetakan Mestika
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. 2003. *Kitāb Fiqih ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah
- Khalaf, Abd al-Wahhab. 1978. *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam
- Ediasih, Sonny Dewi. 2015. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kuncoro, Wahyu. 2010. *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Al-Khalani, Muhammad bin Isma'il. T.th. *Subūl as-Salām*, Juz III. Bandung: Penerbit Dahlan
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Jakarta: Toha Putra
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Masyhūr, Abdurrahman Bin Muhammad bin Husain Bin Umar. 1994. *Bughyatul Murtasyidīn*. Beirut, Dār al-Fikr
- Moloeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Al-Mubarak, Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz. 2012. *Nailul Authar*, Jilid 5. Terj. Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Al-Andalusi, Al-Imām al-Qādhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad bin Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubiy. 1994. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaashid*, Juz 2. Kairo, al-Maktabah al-Khojabiy
- An-Naisabury, Abdul Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Kausyaz al-Qusyairy. 1999. *Shahīh Muslim bi Syarh al-Imām an-Nawawi*, Juz I. Beirut: Dār Ihya at-Turats al-'Arāby
- Nawawi, Imam. 1981. *Shahih Muslim bii Syarh an-Nawawi*, Juz IX. t.t: Daar al-Fikr
- Huda, Ni'Matul. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Halim, Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul. 1978. *al-Fatāwa al-Kubra*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyah
- Nuruddin, Amir & Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS)
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana
- Nurbani, Salim Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1987. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1994. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press
- Projodikoro, Wirjono. 1985. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika
- Ramulyo, M. Idris. 1990. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2. Jakarta: Ind Hillco
- Rifa'i, Ahmad dkk. 1984. *Strategi PPP 1973-1982 Suatu Studi Tentang Kekuasaan Politik Islam di Tingkat Nasional*. Jakarta: Integrita Press,
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, Cet. 1. Jakarta: PT. Raja Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. T.th. *Fiqih Sunnah*, Juz. 2. Kairo: al-Fatih al-I'lam al-'Arabiy
- Shaleh, K. Wantjik, 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soerjono dan H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cett. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta
- Satrio, J. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____. 1995. *Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian I*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soimin, Soedharyo. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga*, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika
- Subekti. 1978. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- _____. 1985. *Hukum Pembuktian*, Cet.7. Jakarta: Pradnya Pramita
- Spardin. 2011. *Materi Hukum Islam*, Cet. I. Makassar: Alauddin University Press
- Sunggono, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Samiarni, Endang. 2004. *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Gender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company
- Asy-Syāfi'i, Al-Imām Muhammad bin Idrīs *al-Umm*. 2001. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub
- Asy Syauckani, Muhammad. 1973. *Nail al-Autar*, Juz IV/III. Beirut: Dār al-Qutub al-Arabia
- Asy-Syarbīnī, Syaikh Syamsuddīn Muhammad bin al-Khotīb. 1997. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati al-Fāzi al-Minhāj*, Juz 3. Beirut: Dār al-Ma'rifah
- Sahrūr, Muhammad. 2000. *Nahwu Ushūl Jadīdah lilfiqhi al-Islāmy, Fiqih al-Mar'ah*. Damaskus: al-Hali lil Tauzi'



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*, Cet ke III. Jakarta : Visimedia
- Sukrie, Erna S. dkk. 2005. *Perkembangan Pemikiran Aktual Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: PP Muslimat NU dan Depag RI
- Sodik, Mochammad (ed). 2004. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PWS IAIN Sunan Kalijaga dan CIDA
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. Ke-5. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Titik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Al-Utsaimin, Muhammad Ibn Shalih. 1427 H. *al-Syarh al-Mumti* 'alā Zād al-Mustaqni', Vol. 12. Beirut: Dār Ibn al-Jauzi
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. 1999. *al-Jam'u Sunan at-Tirmidzi*, Juz II. Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Arabiyy
- T. Jafizham. 1997. *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: CV. Percetakan Mestika
- Usaman, Rachmad. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad *al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa* (Fiqih Wanita Edisi Lengkap). 2016. Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016) h. 429
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wardon, Ahmad. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2001. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras
- Widjaja, Gunawan. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. Ke-6. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- W.J.S, Poerwadarminta. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*. Bandung: al-Ma'arif
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqih Islām wā Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikri
- _____. 2001. *Ushūl al-Fiqih al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Fikr
- Abdullah, Ru'fah. 2016. "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan". *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 3 No. 1
- Dahlan, Ahmad dan Firdaus Albar. 2008. "Perjanjian Pra-Nikah: Solusi Bagi Wanita". *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1



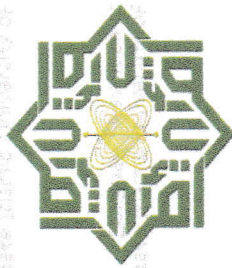
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitri Burhanuddin dan Toto Susmono. 2016. "Pemisahan Harta Perkawinan Melalui Permohonan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Studi Kasus)". Jurnal Repertorium, Volume III No. 2
- Ma'ruf, Umar. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam". Jurnal Akta, Vol. 4 No. 2
- Rini. 2016. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam)". Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 12 No. 2
- Sukardi, Maret 2016, "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Khatuistiwa-Journal of Islamic Studies. Vol. 6 Nomor 1
- Susanti, Dyah Ochtorina, "Mengurai Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan: Perspektif Masalah Mursalah", Jurnal Arena Hukum, Vol. 11 No. 1
- Irianingrum, Farida Dwi. 2008. Studi Tantang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya, *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-2189183/wanita-perlu-tahu-apa-saja-manfaat-perjanjian-pranikah>.
- <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/janji.html> diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 10.34 Wib
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> diakses pada tanggal 23 September 2020, pukul 07.24 Wib
- https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf, Diakses pada tanggal 03 Oktober 2020, pukul 07.56 Wib
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811d246a9498/mk-perlonggar-makna-perjanjianperkawinan?r=0&q=pelonggaran%20makna%20perjanjian%20perkawinan&rs=1847&re=2020>, Diakses pada tanggal 03 Oktober 2020, pukul 08.23 Wib
- <http://www.minangforum.com/showthread.php?t=2523>, Diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 21.07 Wib
- <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/145/83>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2020.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Reka Desrina Wati
ID Number : 21990225664
Date of Birth : December 26, 1995
Sex : Female
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50
Structure & Written Expressions : 56
Reading Comprehension : 53
Overall Score : 530

Expired Date : February 25, 2022



The Committee of Language Development Center
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



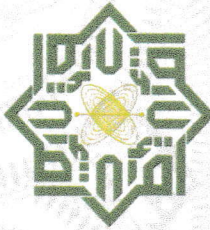
The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU



شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Reka Desrina Wati

دفع القيد : 21990225664

الجنس : Female

المولود : December 26, 1995

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 48

القواعد : 49

القرأة : 50

النتيجة : 490

مستعملة حتى : February 25, 2022

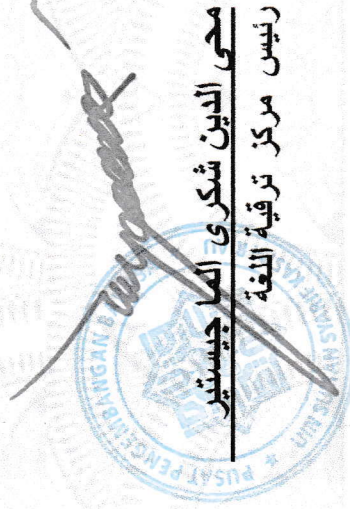


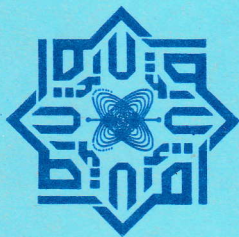
Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info





UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

: Reka Desrina Wati

NIM

: 21990225664

PROGRAM STUDI

: Hukum Keluarga

KONSENTRASI

:

PEMBIMBING I / PROMOTOR

: Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

: Dr. Azni, M.Ag

JUDUL TESIS/DISERTASI

: Perjanjian Perkawinan

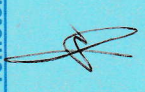
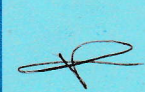


: Pada Pasal 29 Undang -

Undang No. 1 Tahun 1974

Ditinjau Menurut Hukum
Islam

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	Senin, 21/12/2020	Perbaikan latar belakang masalah		
2.	Rabu, 23/12/2020	Perbaikan bab III tentang metode Penelitian		
3.	Kamis, 24/12/2020	Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian Perkawinan		
4.	Jumat, 22/01/2021	Penjabaran jenis penelitian dan penekuatannya		
5.				
6.				

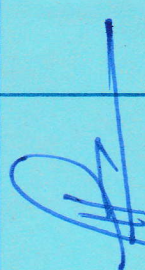
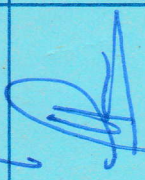
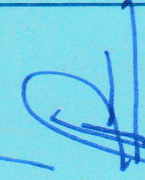
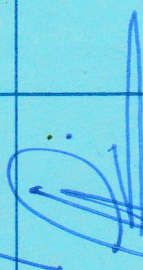
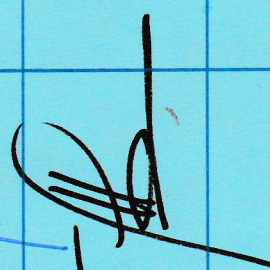
Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 01-02-2021

Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	Rabu, 30/12/2020	Penulisan yang harus disesuaikan dengan EFD		
2.		Perbaikan teori & teori pengujian Perkawinan		
3.		Sejarah pembuatan uu No.1 Tahun 1974 dijabarkan pada Bab IV		
4.		Menganalisis Pasal 29 dengan Fiqih, ushul Fiqih & Filsafat hukum Islam		
5.	8/3/21	sa & nungsi		
6.				

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 08-03-2021

Pembimbing II / Co Promotor*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Reka Desrina Wati
NIM : 21990225664
Fakultas/ Jurusan : Hukum Keluarga
Tempat/Tanggal Lahir : Arga Makmur, 26 Desember
1995
Alamat Domisili : Jln. Manyar Sakti, Panam,
Kec. Tampan Kota Pekanbaru
Motto : *Dum Spiro Spero*

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Salmi
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama Ibu : Sunarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Jeruk No. 257 Desa Karang Suci, Kec. Arga Makmur,
Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu

Jenjang Pendidikan

1. TK al-Qur'an Aisyiah II Karang Suci, Arga Makmur (2001-2002)
2. SDN 17 Karang Suci, Arga Makmur (2002-2008)
3. MTs. Al-Qur'an Harsallakum Bengkulu (2008-2011)
4. MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang (2011-2014)
5. Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang (2014-2018)
6. Jurusan Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019-2021)